



Buletin

PHPL

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

SISTEM SILVIKULTUR INTENSIF (SILIN) MEWUJUDKAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

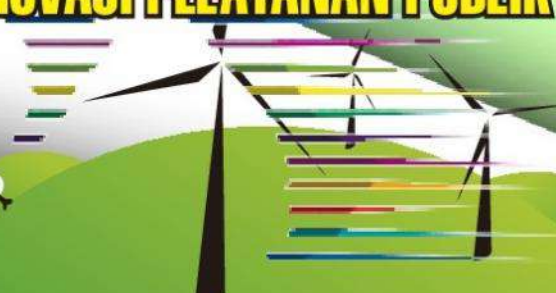


PENERAPAN TEKNIK RIL DAN SILIN PADA MERANTI

APLIKASI SILVIKULTUR INTENSIF UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HUTAN ALAM

PRESIDEN JOKO WIDODO BUKA FESTIVAL KPH DAN PUSAKA 2018

SILK MERAIH PENGHARGAAN TOP 40 INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2018



DEWAN REDAKSI

Pelindung :

Dr. Hilman Nugroho

Penanggung Jawab :

Ir. Misran, MM

Pemimpin Redaksi :

Ir. Sigit Sarjuningtyas, MP

Anggota Redaksi :

Bambang Wiyono, SH, MH

Ir. Nina Maria Korompis

Ratu Ferra Restiana, SE

Editor :

Devi Pertamasari, S. Hut

Dr. Fitri Zola Amandita

Agus Warsito, SH, MH

Deasy Nugraheni S.,

Nana Rusnawan

AR. Taufiq Hidayatulloh, A.Md

Sekretariat :

Sri Wahyuningsih, S.Kom

Anindya Marni Andana, S.Sos

Nurul Huda, A.Md

**Redaksi menerima masukan artikel
melalui :**

buletinphpl@gmail.com

Redaksi:

Sub Bagian Data dan Informasi,

Bagian Program dan Evaluasi

Setditjen PHPL

Alamat :

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 5

Jl. Gato: Subroto – Jakarta Pusat 10270

SALAM REDAKSI

Dengan terbitnya Buletin PHPL Edisi VI Tahun 2018 maka segenap anggota Dewan Redaksi Buletin PHPL mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan YME. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas dukungan seluruh pihak yang telah mengirimkan artikel maupun foto-foto yang telah mengisi halaman Buletin PHPL Edisi VI ini.

Edisi Keenam Buletin PHPL mengangkat tema “SISTEM SILVIKULTUR INTENSIF (SILIN) MEWUJUDKAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI”. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk mengelola hutan secara lestari dan efisien serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat baik didalam maupun sekitar hutan.

Semoga dengan niat memajukan negara tercinta Indonesia melalui sektor kehutanan, maka seluruh pembaca buletin dapat berperan serta melalui media ini untuk berbagi informasi positif guna kebangkitan sektor kehutanan.

Salam PHPL Unggul





PRAKATA

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyadari bahwa mengupayakan keseimbangan tiga fungsi hutan yaitu fungsi ekonomis, fungsi ekologis dan fungsi sosial merupakan tantangan dalam mewujudkan pengelolaan hutan produksi yang lestari.

Dengan mengangkat slogan “Kayu Melimpah, Rakyat Sumringah”, maka tekad Direktorat Jenderal PHPL untuk mengelola hutan produksi lestari antara lain dengan mengembangkan teknik Silvikultur Intensif yang diaplikasikan pada hutan alam sekunder, dengan melakukan penanaman pengkayaan dengan jenis asli/native species unggul, dalam hal ini didahului dengan jenis Meranti.

Pengembangan Teknik Silvikultur Intensif Meranti merupakan semangat

perubahan dan keyakinan bahwa teknik ini akan menjadi awal dalam mengembangkan tegakan-tegakan kayu komersial di Hutan Alam Indonesia. Keyakinan berdasarkan penelitian, pengembangan keilmuan dan keterlibatan para pihak untuk mendukung kegiatan ini.

Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Buletin PHPL Edisi VI kami angkat tema “Sistem Silvikultur Intensif mewujudkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari”, melalui wadah Buletin PHPL Edisi VI kami berbagi informasi mengenai Silvikultur Intensif dan informasi lain yang bermanfaat

Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Dr. Hilman Nugroho

DAFTAR ISI

4

Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (Reduce Impact Logging/RIL) dan Teknik Silvikultur Intensif Meranti pada Pengelolaan Hutan Produksi

8

Aplikasi Silvikultur Intensif (SILIN) Untuk Peningkatan Produktivitas Hutan Alam menuju Pengelolaan Hutan yang Produktif dan Lestari

10

Reduced Impact Logging (RIL) Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

12

Penerapan SILIN (Silvikultur Intensif) pada IUPHHK PT. Triwiraasta Bharata

18

Kementerian LHK Gelar Festival KPH Tingkat Nasional dan Pameran Usaha Kehutanan (PUSAKA) Tahun 2018

21

Buka Festival KPH Tingkat Nasional dan Pusaka Tahun 2018 Presiden Joko Widodo Tekankan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan

24

Kegiatan Festival KPH Tingkat Nasional dan Pameran Usaha Kehutanan (PUSAKA) Tahun 2018 di Hutan Pinus Mangunan, Yogyakarta

26

60 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia - Jepang, Ditjen PHPL Pamerkan Produk KPHP dalam Festival Indonesia di Hibiya Park, Tokyo, Jepang

29

Sekilas Tentang Exchanging Experiences for Sustainable Land and Resources Management Including in Peatlands di Wageningen University, Belanda

30

Liputan Singkat Indonesia – Finland Joint Working Group (JWG) on Forestry and Natural Resources Management Ke-2 Di Helsinki, Finlandia

32

Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

33

Prioritas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada Tiga Kabupaten di Papua Barat

39

Pemanfaatan Usaha Jasa Lingkungan Wisata Alam Hutan Pinus Mangunan Yogyakarta

41

Pembuatan Daerah Penyangga Habitat Lebah untuk Mendukung Kelestarian Pengelolaan Madu Hutan di KPHP Rote Ndao dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis

46

Analisis Peraturan, Kajian Untuk Penyempurnaan

48

Cara SILK Menjawab Tantangan Global Perdagangan Kayu Legal, Hingga Meraih Penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018.

52

Optimalisasi IUIPHHK Berkapasitas sampai dengan 6000 M³ Per Tahun Dalam Peningkatan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku dan Peningkatan Kualitas Produk

55

Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari “Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas dan Kerja Tuntas”

57

Workshop Pengembangan Jabatan Fungsional PEH Lingkup Ditjen PHPL, Mau dibawa kemana PEH Ditjen PHPL?



Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (Reduce Impact Logging/RIL) dan Teknik Silvikultur Intensif Meranti pada Pengelolaan Hutan Produksi

Oleh Ir. Anastasia Maria Listianingsih, M.M
Direktorat Usaha Hutan Produksi

Sebuah tantangan untuk membangun masa depan produk Kehutanan yang langgeng terutama produk kayu yaitu harapan yang tertuang dalam slogan “Kayu melimpah, rakyat sumringah” merupakan usaha mewujudkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) telah melaksanakan Sosialisasi/ Konsultasi

Publik NSPK, Perdirjen Reduce Impact Logging, Perdirjen Multi Usaha dan Perdirjen SILIN di Jakarta pada tanggal 26 – 27 November 2018. Acara ini dihadiri lebih dari 200 (dua ratus) peserta yang berasal dari Perguruan Tinggi, Kementerian/Asosiasi terkait, Dinas Provinsi, BPHP, KPH dan Pemegang IUPHHK-HA.

Ditjen PHPL telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor

Sebuah tantangan untuk membangun masa depan produk Kehutanan yang langgeng terutama produk kayu yaitu harapan yang tertuang dalam slogan “Kayu melimpah, rakyat sumringah” merupakan usaha mewujudkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) telah melaksanakan Sosialisasi/ Konsultasi Publik NSPK, Perdirjen Reduce Impact Logging, Perdirjen Multi Usaha dan Perdirjen SILIN di Jakarta pada tanggal 26 – 27 November 2018. Acara ini dihadiri lebih dari 200 (dua ratus) peserta yang berasal dari Perguruan Tinggi, Kementerian/Asosiasi terkait, Dinas Provinsi, BPHP, KPH dan Pemegang IUPHHK-HA.

Ditjen PHPL telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (Reduce Impact Logging/RIL) pada Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam.

Teknik Pemanenan Berdampak Rendah atau RIL merupakan teknik dengan pendekatan secara sistematis dan menyeluruh (komprehensif) dalam pemanenan hasil hutan kayu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi

dengan tujuan untuk mengurangi kerusakan pada tanah dan tegakan tinggal, meningkatkan efisiensi pemanfaatan hasil hutan kayu, serta meminimalkan dampak pemanenan hutan terhadap aspek ekologi dan sosial.

Adanya Pedoman RIL diharapkan pemanenan hasil hutan kayu dapat dilaksanakan secara efektif sehingga mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dengan tingkat kerusakan terhadap lingkungan yang rendah, pemegang IUPHHK-HA dapat mengelola hutan alam tanah kering dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), dan pelaksanaan kegiatan penilaian sertifikasi PHPL yang dilakukan oleh Lembaga Penilai Independen dalam penerapan RIL. Hal penting dalam ruang lingkup pengaturan Pedoman Penerapan RIL adalah perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan, dan paska pemanenan. Hal penting lainnya untuk diperhatikan setelah pelaksanaan pemanenan (paska pemanenan) adalah penutupan jalan sarad dan penutupan TPn, sehingga lokasi tersebut dapat dilakukan penanaman kembali.

Tujuan penerapan teknik RIL adalah meminimalkan dampak negatif aktivitas pembalakan hutan pada lingkungan yang erosi, sedimentasi, maupun pengaruh air sungai, meningkatkan efisiensi pembalakan melalui pengurangan volume limbah penebangan, biaya pembalakan dan peningkatan kualitas produksi kayu,

menciptakan ruang tumbuh yang optimal bagi tegakan tinggal dengan memaksimalkan pertumbuhan pohon dan hasil hutan bukan kayu, meningkatkan pendapatan, kesehatan dan keselamatan pekerja maupun masyarakat, menciptakan prakondisi pengelolaan hutan produksi secara lestari.

Pelaksanaan konsultasi publik Perdirjen tentang Pedoman Teknik Silvikultur Intensif Meranti dalam Pengelolaan Hutan Alam Produksi, draft Perdirjen telah dicermati oleh Tim Silvikultur Intesif yang dibentuk oleh Ditjen PHPL, yang terdiri dari tenaga ahli sebanyak 16 (enam belas) orang dari berbagai Universitas, yaitu Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Mulawarman, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Palangka Raya, Universitas Tanjungpura, Universitas Sumatera Utara dan Universitas Bengkulu. Tim ini akan menjadi pendamping bagi Unit Manajemen untuk melaksanakan Silvikultur Intensif di arealnya.

Silvikultur Intensif merupakan suatu teknik silvikultur yang memperpadukan unsur pemuliaan pohon, manipulasi lingkungan dan pengelolaan hama secara terpadu pada kegiatan pembangunan hutan. Diterapkan pada kegiatan TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) maupun TPTJ (Tebang Pilih Tanam Jalur).

Teknik Silvikultur Intensif dalam pengaplikasiannya di hutan alam sekunder

dilakukan dengan melakukan penanaman pengkayaan (enrichment planting) berbasis pada jenis asli/native species unggul, dimana pendekatan dilakukan dengan menggunakan teknik penanaman jalur maupun penanaman rumpang/gap planting.

Pelaksanaan teknologi Silvikultur Intensif dengan jenis dipterokarpa unggul mampu meningkatkan pertumbuhan diameter tanaman hingga lebih dari 1,7 cm/tahun dibandingkan pertumbuhan meranti secara alami (natural regeneration) yaitu berkisar 0,4 cm/tahun, sehingga akan menghasilkan produktivitas hutan alam lebih dari 300% dibandingkan dengan pemanfaatan hutan alam tanpa kegiatan penanaman pengkayaan secara intensif.

Terdapat 6 (enam) jenis meranti unggul yang dipilih untuk pelaksanaan Silvikultur Intensif Meranti yaitu *Shorea leprosula*, *Shorea parvifolia*, *Shorea johorensis*, *Shorea platyclados*, *Shorea macrophyla* dan *Shorea stenoptera*.

Manfaat yang akan didapat dengan menerapkan teknik Silvikultur Intensif antara lain mengurangi degradasi hutan melalui kegiatan pengembalian tutupan hutan, meningkatnya produksi kayu bulat pada hutan alam, meningkatnya investasi di sektor kehutanan, meningkatnya ekspor produk industri kehutanan, meningkatnya PNBK, meningkatkan penyerapan tenaga kerja karena pelaksanaan SILIN



merupakan pembangunan hutan alam yang bersifat padat karya, dan mempercepat pencapaian target pengurangan emisi karbon dari sektor Kehutanan melalui penanaman.

Pedoman Teknik Silvikultur Intensif Meranti ini dimaksudkan antara lain memberikan arahan pelaksanaan Silvikultur Intensif Meranti di lapangan dan arahan umum pada seluruh pemegang IUPHHK-HA sehingga meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak seumur yang dikelola dengan tebang pilih dan melalui pola jalur atau rumpang. Kedepan seluruh IUPHHK-HA diwajibkan untuk melaksanakan Silvikultur Intensif Meranti dengan mengacu pada pedoman ini.

Draft Perdirjen PHPL tentang Pedoman Teknik Silvikultur Intensif Meranti dalam Pengelolaan Hutan Alam Produksi ini masih membutuhkan masukan untuk

penyempurnaannya, Ditjen PHPL membuka email rkuphaunggul@gmail.com untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang akan memberikan saran maupun kritik.

Pedoman Teknik Silvikultur Intesif Meranti merupakan sebuah langkah awal untuk pengembangan tegakan yang memproduksi kayu komersial, dan akan terus diupayakan untuk mengembangkan jenis-jenis tegakan lainnya yang juga memproduksi kayu komersial yang berasal dari Hutan Alam Indonesia. Beberapa hal yang mendukung pelaksanaan Silvikultur Intensif Meranti, Ditjen PHPL telah merencanakan serangkaian kegiatan dengan Tim SILIN yang terdiri dari tenaga-tenaga ahli, antara lain :

1. Evaluasi Pelaksanaan SILIN;
2. Pendampingan Penerapan SILIN;
3. Sosialisasi dan Supervisi SILIN;
4. Peningkatan Kapasitas SDM SILIN.



Aplikasi Silvikultur Intensif (SILIN) untuk Peningkatan Produktivitas Hutan Alam Menuju Pengelolaan Hutan yang Produktif dan Lestari

Oleh : Irwan Maulana
Direktorat Usaha Hutan Produksi

LATAR BELAKANG

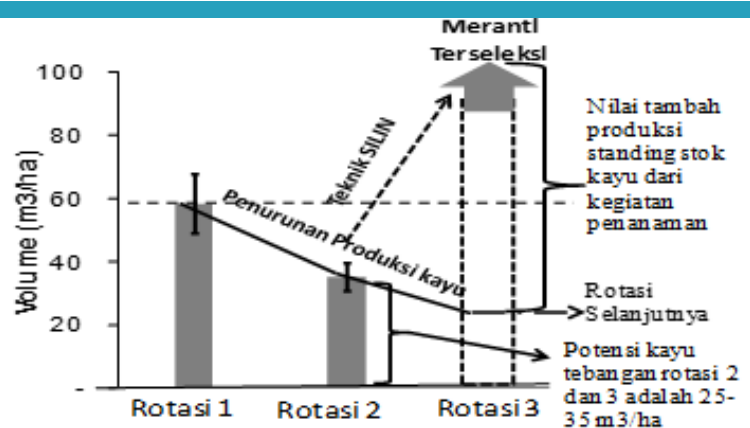
Produktifitas hutan alam cenderung menurun drastis, dimana di era 1990-an produksi kayu dari hutan alam mencapai 28 juta m³, menurun drastis hingga 5,6 juta m³ (80%) pada tahun 2015.

Penyebab penurunan produksi kayu dari hutan alam tersebut adalah luas areal

hutan alam yang menurun dan pertambahan tiap diameter tegakan tinggal pada hutan alam $\pm 0,4$ cm/tahun. Dampaknya adalah penurunan jumlah industri pengolahan kayu dan serapan tenaga kerja serta keragaman hayati hutan alam sekunder.

Tahun	Luas Hutan (Juta ha)	Produksi Kayu (Juta m ³)
1990	59,6	28
2003	27,8	11
2007	27,8	9,1
2011	23,4	5,6
2015	20,7	5,6

Sumber: Kemenhut 2012; KLHK 2015; APhi 2016



SILIN (Silvikultur Intensif)

Suatu teknik silvikultur yang memperpadukan unsur pemuliaan pohon, manipulasi lingkungan dan pengelolaan hama secara terpadu pada kegiatan pembangunan hutan. Diterapkan pada kegiatan TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) maupun TPTJ (Tebang Pilih Tanam Jalur). Diyakini akan mampu mewujudkan hutan Indonesia yang lebih bermanfaat, mempunyai nilai ekonomi, ekologi dan sosial yang tinggi, sehat dan lestari.

Aplikasi Teknik SILIN

Pengaplikasian teknik SILIN pada hutan alam sekunder dilakukan dengan melakukan penanaman pengkayaan (**enrichment planting**) berbasis pada jenis asli/**native species** unggul.

Pendekatan ini akan menggunakan teknik penanaman jalur maupun penanaman rumpang/**gap planting**.



Teknologi SILIN dengan jenis dipterokarpa unggul mampu meningkatkan pertumbuhan diameter tanaman hingga > 1,7 cm/tahun dibandingkan pertumbuhan meranti secara alami (**natural regeneration**), yaitu berkisar 0,4 cm/tahun, sehingga akan menghasilkan produktivitas hutan alam >300% dibandingkan dengan pemanfaatan hutan alam tanpa kegiatan penanaman pengkayaan secara intensif.

Manfaat SILIN

1. Mengurangi degradasi hutan melalui kegiatan pengembalian tutupan hutan (penanaman dengan teknik silvikultur SILIN);
2. Meningkatnya produksi kayu bulat pada hutan alam;
3. Meningkatnya investasi di sektor kehutanan;
4. Meningkatnya ekspor produk industri kehutanan;
5. Meningkatnya PNPB yang bersumber dari PSDH dan DR sebesar > 250%;
6. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 2.000 HOK per 100 ha, khususnya bagi masyarakat sekitar hutan karena pelaksanaan SILIN meranti merupakan pembangunan hutan alam yang bersifat padat karya;
7. Mempercepat pencapaian target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan melalui penanaman pada jalur SILIN (tercapainya target NDC).

Reduced Impact Logging (RIL)

dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Oleh: Irwan Maulana
Direktorat Usaha Hutan Produksi

RIL adalah pendekatan sistematis dalam kegiatan pemanenan hutan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemanenan kayu. Pada prinsipnya, RIL merupakan penyempurnaan terhadap praktek pemanenan hutan yang sudah ada. Penyempurnaan terhadap praktek pemanenan tersebut antara lain peningkatan keterampilan dan wawasan operator yang baik, serta kebijakan yang mendukungnya.

Tujuan pemanenan hutan dengan teknik RIL adalah untuk mengurangi terjadinya limbah pemanenan, kerusakan pada tanah dan tegakan tinggal, serta dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial. Dengan penerapan teknik RIL, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan pemanenan hutan dan melaksanakan pengelolaan hutan dengan prosedur yang lebih baik.

Gambar 1. RIL, memanen tanpa merusak.



Dalam praktek, penerapan teknik RIL akan memberikan keuntungan, yaitu:

- Meminimalisir limbah pemanenan.
- Meningkatkan produksi kayu.
- Mengurangi kerusakan tanah lantai hutan.
- Mengurangi kerusakan tegakan tinggal.
- Mengurangi emisi karbon.
- Mengurangi penurunan kualitas air dan udara.
- Mengurangi biaya pemanenan kayu.



Gambar 2 : Peningkatan keterampilan dan wawasan operator dalam penerapan teknik RIL.

Apabila melihat berbagai keuntungan penerapan teknik RIL tersebut di atas, tentu menjadi sesuatu hal yang menarik untuk

dilaksanakan dalam hal pemanenan kayu. Dengan dilaksanakannya RIL, hutan, pemanfaatan hutan, dan produktivitas hasil hutan kayu akan lestari. Kelestarian pemanfaatan hasil hutan kayu tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan dan penerimaan negara. Selain itu, iklim berusaha dibidang hasil hutan kayu akan terjaga rantai pasokan bahan bakunya.

Dalam hal pengendalian perubahan iklim, penerapan teknik RIL dalam pemanenan hasil hutan kayu akan mempunyai dampak positif. Pertama, dengan penerapan teknik RIL akan membantu mempertahankan simpanan karbon dan menekan emisi CO₂ sebesar 41% dalam proses dekomposisi serasah. Kedua, akan meningkatkan laju penyerapan CO₂ dari udara sebesar 1,7 kali dan penyimpanan karbon hutan sebesar 1,56 kali. Ketiga, Menurunkan emisi CO₂ sebesar 29 – 50% dari emisi CO₂ yang disebabkan deforestasi hutan dan perubahan tata guna hutan.

Gambar 3 : Ilustrasi kelestarian hutan, gambar www.merdeka.com



Penerapan SILIN (Silvikultur Intensif) Pada IUPHHK-HA PT. Triwiraasta Bharata

Oleh Durahman, S.Sos, MM
Direktorat Usaha Hutan Produksi

Pengelolaan hutan alam produksi selama ini belum menerapkan kegiatan pembinaan hutan secara intensif sehingga potensi tegakan pada daur berikutnya cenderung menurun. Kegiatan regenerasi berupa penanaman atau pengayaan dan pemeliharaan tegakan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Kondisi ini mengakibatkan tidak terjaminnya pengelolaan hutan alam secara lestari sehingga perlu dilakukan perbaikan teknik silvikultur.

Teknik Silvikultur Intensif (SILIN) merupakan suatu terobosan baru dalam pembinaan hutan alam yang dapat meningkatkan produktivitas hutan. Dalam rangka meningkatkan produktivitas hutan bekas tebangan atau areal non-hutan di hutan alam di Indonesia, sejak tahun 2005 telah diterapkan sebuah teknik silvikultur relatif baru yang dikenal dengan nama Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) Silvikultur Intensif (SILIN). Pada awalnya TPTJ SILIN diterapkan pada 6 (enam) IUPHHK yang dianggap sebagai model, terutama dalam penanaman meranti. Kemudian, sejumlah IUPHHK juga telah mencoba menerapkan.

Namun dengan seiring berjalannya waktu, muncul beberapa hambatan atau kendala dalam penerapan teknik TPTJ SILIN, di antaranya adalah variasi

pertumbuhan yang tinggi pada jenis tanaman yang dikembangkan di dalam jalur dengan persentase hidup yang rendah dan biaya yang mahal. Akibatnya sebagian IUPHHK pelaksana TPTJ SILIN tidak melanjutkan atau berhenti menerapkan teknik tersebut. Sehubungan dengan hal ini, langkah-langkah perbaikan baik Regulasi, Pola tanam, dan pemeliharaan tanaman secara intensif, sedang dalam Kajian Tim Pakar Silin dari berbagai Universitas bekerjasama dengan Direktorat Usaha Hutan Produksi.

Berikut ini beberapa jenis pertumbuhan tanaman Silin (berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun) yang di tanam pada Blok RKT tahun 2010 yang diambil dari lokasi PT Triwiraasta Bharata (PT TAB) yang digunakan sebagai salah satu model SILIN, dengan variasi tumbuh sebagai berikut:



Dalam penerapan teknik SILIN dalam suatu Unit Manajemen IUPHHK terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan secara khusus, yaitu:

1. Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Lahan Tanam

Kegiatan penyiapan lahan meliputi praktek pembuatan jalur tanam, pembuatan lubang tanam, dan penanaman. Pengamatan di lapangan pada PT TAB menunjukkan bahwa sejak ditunjuk menjadi IUPHHK Model SILIN pada RKT tahun 2008 s/d 2018, PT TAB telah melaksanakan TPTJ SILIN di lapangan, meskipun jumlah luasan lahannya mengalami penurunan karena penyiapan lahan yang dilakukan kurang memperhatikan kondisi lahan dan lingkungannya. Sebagai contoh, masih ditemukan jalur tanam teknik TPTJ



SILIN yang dibuat pada lahan dengan topografi curam. Pembuatan jalur tanam pada lahan bertopografi curam bukan saja menemui banyak kesulitan dalam banyak hal, seperti pembuatan lubang, pengangkutan bibit, pembuatan jalur bersih, dan pemangkasan kanopi sekitarnya. Akibatnya, tingkat keberhasilan penanaman rendah, banyak tanaman yang tidak tumbuh.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembibitan/Persemaian

Kegiatan pembibitan/persemaian di PT TAB meliputi antara lain: (i) koleksi bibit dari cabutan alam, (ii) penyemaian bibit



cabutan alam. Bibit yang ditanam di lapangan hampir semua berasal dari cabutan alami, dan sebagian besar tidak diketahui secara pasti kualitas pohon induknya. Dengan demikian maka tanaman meranti yang ditanam di PT TAB dengan teknik SILIN sebagian besar belum merupakan jenis unggul, seperti yang diharapkan oleh teknik ini. Barangkali itulah salah satu faktor yang menyebabkan tingkat variasi pertumbuhan tanaman di lapangan juga sangat tinggi.

Suplay bibit mengandalkan kepada anakan alami. Jenis anakan alami yang berada di persemaian didominasi oleh jenis ***Dryobalanops oblongifolia*** (kapur). Jenis bibit yang ada di persemaian adalah : ***Shorea leprosula***, ***Shorea parvifolia***, ***Dryobalanops oblongifolia***, ***Dryobalanops lanceolata*** dan jenis pohon buah (cempedak).

Selain teknik pembibitan tersebut di atas, ada beberapa yang perlu mendapatkan perhatian dari Unit Manajemen, antara lain sarana dan prasarana pembibitan dan produktivitas bibit yang masih relatif sederhana. Media tanam untuk pembibitan menggunakan topsoil. Ukuran bedeng pembibitan adalah 5m x 1m. Ukuran bedeng untuk bibit yang baru dipindahkan dari sungkup adalah 3m x 1m. Produktivitas bibit perlu ditingkatkan, karena sampai saat ini masih rendah.

3. Pelaksanaan Kegiatan Penanaman.

Di PT TAB penanaman meranti di lapangan sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini

tahun 2018. Pada periode awal, yakni tahun 2008-2009 kegiatan penanaman dilakukan dengan relatif baik, mulai dari pembuatan lobang tanam sampai dengan pemeliharaan selama 2 tahun pertama. Hal ini antara lain karena masih dalam pembimbingan Tim Pakar SILIN dari Kementerian Kehutanan. Terdapat 15 petak yang diperuntukkan untuk sistem TPTJ SILIN yang telah dilaksanakan penanaman oleh PT. TAB kurun waktu 2008-2018. Namun, setelah 2009 sampai dengan 2018, meskipun dilakukan penanaman, pemeliharaan sangat kurang, sehingga pertumbuhan tanaman tidak optimal. Bahkan untuk 3 petak tanaman RKT Tahun 2008 saat ini telah diokupasi oleh masyarakat dan ditanami karet.

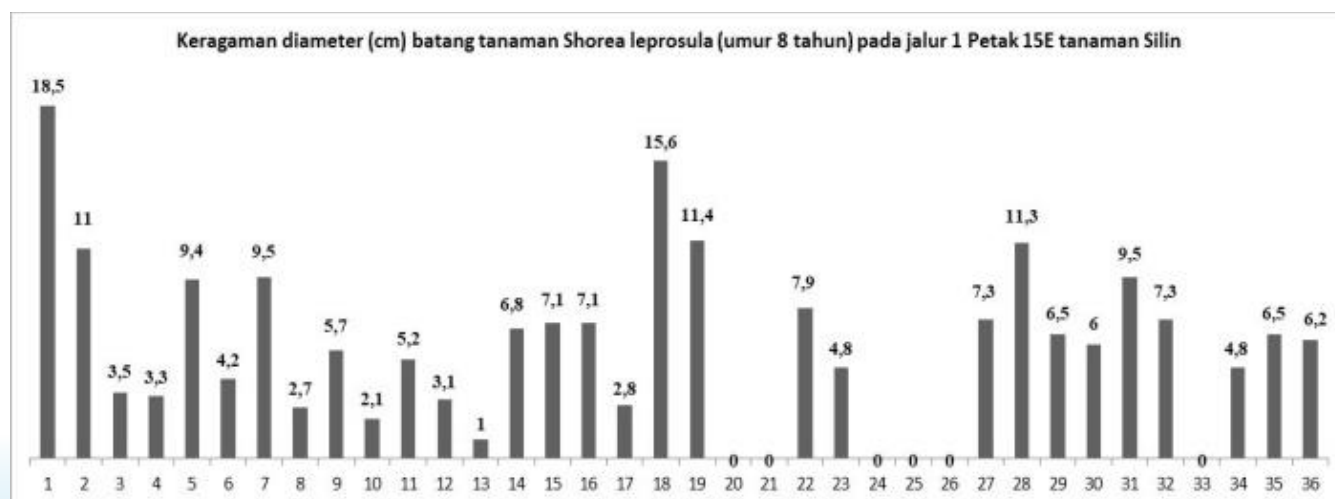
Pengamatan di lapangan menunjukkan kondisi tanaman Silin sangat beragam baik dari parameter diameter dan tinggi tanamannya. Ruang tumbuh pada jalur tanam masih belum ideal untuk pertumbuhan bibit tanaman silin. Ditemukan tegakan tinggal dengan ukuran besar dari jenis kayu komersial (seperti kapur, kruing, gerunggang) di dalam jalur tanam. Jenis kayu komersial ini dibiarkan hidup karena nilai ekonomi kayunya. Keberadaan jenis kayu komersial ini berdampak pada ternaungnya bibit tanaman silin. Bibit tanaman silin yang tumbuh besar ditemukan pada posisi di pinggir dan di bekas jalan sarad dengan naungan matahari yang cukup. Bibit tanaman silin yang pertumbuhannya tertekan atau mati, ditemukan pada tapak yang basah (alur air), bekas jalan sarad dengan tingkat keterbukaan tinggi, dan bekas

jalan sarad yang tanahnya mengeras. Bibit tanaman Silin sebagian besar berupa jenis ***Shorea leprosula***. Ada juga ***Shorea smithiana***, dengan jumlah sedikit. Ditemukan adanya kerusakan pada batang tanaman silin akibat bekas lilitan liana (jenis ***Shorea leprosula***), dan kerusakan daun (lubang-lubang, pada jenis ***Shorea smithiana***). Kegiatan pemeliharaan terhadap tanaman silin belum dilakukan secara intensif dengan periode waktu yang jelas.

Tanaman meranti pada umumnya tumbuh baik pada jalur-jalur tanaman dengan pencahayaan cukup. Berkurangnya sinar matahari masuk ke jalur tanaman disebabkan terutama oleh penutupan kanopi dari pohon-pohon yang berada di jalur antara. Selain itu, pengamatan lapang

menunjukkan adanya jenis hama atau penyakit yang menyerang batang meranti, seperti rayap. Batang meranti yang terserang hama rayap menunjukkan gejala yang berupa lapisan tanah pada batang dari pangkal sampai beberapa meter di atas permukaan tanah.

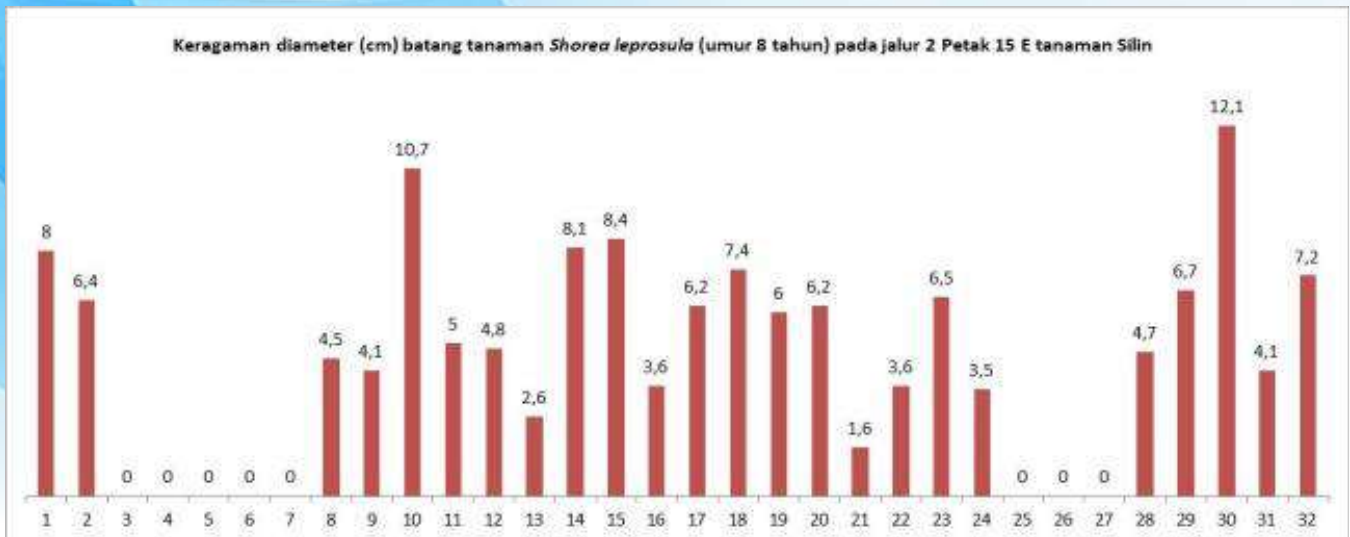
Berdasarkan hasil Pengamatan dan pengukuran pertumbuhan tanaman di PT TAB dilakukan di petak ukur permanen (PUP). Blok Penanaman RKT tahun 2010, yang terdiri dari jenis tanaman jenis meranti (***Shorea leprosula*** dan ***Shorea smithiana***). Keragaman diameter (cm) batang tanaman ***Shorea leprosula*** (umur 8 tahun) pada jalur 1 Petak 15 E tanaman SILIN dapat digambarkan sebagaimana diagram di bawah.



Meskipun terdapat variasi yang cukup besar, secara umum ditemukan bahwa tanaman meranti memiliki diameter **meranti** sangat bervariasi, yakni berkisar dari 0 cm sampai 18,5 cm, ini dikarenakan di jalur antara (jalur tanam) masih terdapat naungan yang rapat sehingga menekan pertumbuhan tanaman meranti. Selain itu pemeliharaan tanaman melalui kegiatan

penyulaman tanaman yang mati tidak dilaksanakan optimal oleh pihak perusahaan.

Keragaman diameter (cm) batang tanaman ***Shorea leprosula*** (umur 8 tahun) pada jalur 2 Petak 15 E tanaman SILIN dapat digambarkan sebagaimana diagram di bawah.



Meskipun terdapat variasi yang cukup besar, secara umum ditemukan bahwa tanaman meranti memiliki diameter **meranti** sangat bervariasi, yakni berkisar dari 0 cm sampai 12,1 cm, ini dikarenakan di jalur antara (jalur tanam) masih terdapat naungan yang rapat sehingga menekan pertumbuhan tanaman meranti. Selain itu pemeliharaan tanaman melalui kegiatan penyulaman tanaman yang mati tidak dilaksanakan optimal oleh pihak perusahaan.

Hal yang menyebabkan belum maksimalnya Penerapan SILIN seperti yang dilakukan oleh Unit Manajemen lain seperti PT. SBK, PT. Erna Djuliyawati dan yang lainnya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Belum tersedianya bibit unggul pada kegiatan penanaman SILIN; bibit yang ditanam pada saat ini berasal dari cabutan alam yang sumbernya bukan pohon plus (unggul) bukan dari hasil teknik pembuatan bibit yang baik dan unggul;
- Belum optimal pelaksanaan kegiatan manipulasi lingkungan (pengaturan cahaya, mengurangi persaingan tumbuh dengan pengaturan jarak

tanam, pembebasan pohon binaan dari gulma, dan pemberian nutrisi/ pemupukan).

- Belum adanya kegiatan pengendalian hama penyakit terpadu (identifikasi hama penyakit serta predatornya, tidak melakukan penebangan pada jalur antara selama daur tanaman SILIN, belum ada upaya pengendalian hama penyakit terhadap tanaman yang terserang).
- Kegiatan pemeliharaan tanaman belum dilakukan dengan optimal, terkait tidak adanya dana dari manajemen untuk kegiatan pemeliharaan.

Langkah Alternatif dan Solusi yang harus dilakukan oleh PT. TAB sehubungan dengan kegiatan penerapan teknik TPTJ SILIN, antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak manajemen harus merekrut tenaga teknis yang memiliki kualifikasi tehnik TPTJ SILIN sebagai upaya peningkatan kegiatan penerapan teknik SILIN sampai dengan tahun 2021, atau membekali Ganis nya dengan mengikut sertakannya dalam Diklat yang berhubungan dengan SILIN.

- b. Manajemen harus mengupayakan pengadaan beberapa fasilitas atau sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan SILIN, seperti pembelian traktor dan truk, perbaikan Sarana dan Prasarana Persemaian, sehingga dapat menghasilkan bibit unggul yang berkualitas.
- c. PT. TAB merintis kerjasama (pembuatan MoU) dengan Litbang Dipterocarpaceae Kalimantan Timur untuk pendampingan kegiatan penerapan TPTJ SILIN.

- d. Kegiatan Pemeliharaan harus dilaksanakan secara intensif minimalnya 4 bulan sekali untuk tahun pertama dan 3 bulan sekali untuk tahun ke 2 dan tahun-tahun selanjutnya cukup setiap 6 bulan, termasuk kegiatan penyiangan dan pendangiran sehingga Tanaman SILIN bisa tumbuh dengan baik.





Kementerian LHK Gelar Festival KPH Tingkat Nasional dan Pameran Usaha Kehutanan (PUSAKA) Tahun 2018

oleh: Andhika Respati HN, ST, M.SEP
Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hutan adalah pusaka negeri ini yang sekaligus menjadi jati diri bangsa Indonesia. Tanpa hutan, apalah jadinya Indonesia? Kelestarian hutan haruslah dijaga karena tidak hanya menjamin kelangsungan ekologi namun juga menghadirkan manfaat secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Mengusung tema Hutan Lesari untuk Kemakmuran Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar Festival Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tingkat Nasional dan Pameran Usaha Kehutanan (PUSAKA) di Hutan Pinus Mangunan, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 28-29 September 2018.

Festival KPH Tingkat Nasional dan PUSAKA bertujuan untuk menampilkan produk-produk unggulan KPH berbasis pemberdayaan masyarakat dalam

pengelolaan hutan. Selain itu, festival dan pameran tersebut juga akan menampilkan produk-produk kehutanan dan turunannya oleh mitra kehutanan. Diversifikasi hasil hutan mewujudkan multi-bisnis di hutan produksi.

Indonesia masih memiliki hutan-hutan produksi yang potensial sebagai kawasan usaha kehutanan, baik berupa hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK). Bahkan HHBK seperti jasa lingkungan dan wisata alam terus berkembang secara inovatif dan adaptif sebagai salah satu penyumbang devisa andalan bagi negara.

Kehadiran KPH sebagai lembaga pengelolaan hutan di tingkat tapak merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam upaya membenahi tata kelola hutan

Indonesia agar mampu menjawab tantangan produktifitas hutan lestari yang lebih dinamis dan manfaatnya bisa langsung dinikmati oleh masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Model

pengusahaan hutan berbasis KPH mampu menyempurnakan tata kelola hutan Indonesia dimana akses pemanfaatan hutan yang diberikan kepada masyarakat dapat terarah dan terukur.



Gambar 1. Persiapan Festival KPH dan Pusaka Tahun 2018

Menteri LHK Siti Nurbaya saat meninjau persiapan festival dan pameran PUSAKA pada hari Kamis, 27 September 2018 menyampaikan, “Bapak Presiden Joko Widodo berpesan bahwa hutan itu harus mensejahterakan masyarakat.” Seluruh pihak yang terlibat dalam produksi hutan akan berpartisipasi pada festival dan pameran ini, baik dari instansi pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, maupun organisasi massa dan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan. “Masyarakat lah kunci sukses pengelolaan hutan Indonesia yang lestari,” ungkap Menteri LHK. Festival KPH Tingkat Nasional dan PUSAKA selama dua hari menampilkan berbagai teknologi usaha kehutanan seperti: Reduce Impact Logging (RIL), Silvikultur Intensif (SILIN), Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK),

Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi (SINPASDOK) KPH, hingga Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) dan Xylarium Bogoriense 1915.

Sementara itu, pameran hasil hutan kayu menunjukkan kehebatan kayu yang tidak bisa tergantikan dengan bahan lainnya meliputi rumah Tomohon, furnitur premium, **pulp** dan kertas, kayu solid, kayu lapis, kayu MDF, **parquet**, arang **bricket** hingga **wood pellet**. Selanjutnya hasil hutan bukan kayu (HHBK) menunjukkan bahwa kekayaan hutan Indonesia dari Sabang sampai Merauke juga meliputi produk kopi dan teh, madu dan gula aren, produk kerajinan seperti rotan, bambu, anyaman, tikar, produk minyak/bioenergi, serta produk pangan seperti jagung, padi, singkong dan sebagainya.



Gambar 2. Rumah Tomohon



Gambar 2. Beras & Jagung



Gambar 3. Anyaman Tas & Tikar



Gambar 4. Madu



**Buka Festival KPH Tingkat Nasional dan PUSAKA Tahun 2018
Presiden Joko Widodo Tekankan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan**

Oleh : Andhika Respati HN, ST, M.SEP
Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Presiden RI Joko Widodo membuka secara resmi Festival Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tingkat Nasional dan Pameran Usaha Kehutanan (PUSAKA) Tahun 2018 di Hutan Pinus Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta pada hari Jumat, 28 September 2018. Festival KPH dan PUSAKA selama dua hari tersebut menampilkan berbagai teknologi usaha kehutanan serta hasil hutan kayu dan non-kayu.

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan, “kita harus bersyukur bahwa hutan Indonesia tidak hanya berperan mengurangi emisi karbon dan menjaga keseimbangan lingkungan sebagai paru-paru dunia, namun juga menjadi sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.” Berbagai

produk kehutanan baik kayu maupun non-kayu memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti **block log, plywood, vinyl**, hingga madu, gula aren, kopi, teh, sutera, bahkan sektor wisata alam seperti Hutan Pinus Mangunan.

“Saya tahu Hutan Pinus Mangunan ini dari Instagram,” ungkap Presiden Joko Widodo. Keindahan Hutan Pinus Mangunan menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berekreasi dan berinteraksi dengan alam. Menurut data Kementerian LHK, dalam satu tahun Hutan Pinus Mangunan dapat dikunjungi oleh 2,5 juta pengunjung dengan perolehan dana total hingga Rp. 10 Milyar, dimana 75% keuntungan diterima oleh masyarakat dan 25% untuk KPH.



Gambar 1. Presiden Tekankan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan

Selain manfaat yang di dapat dari sektor wisata alam, beberapa perwakilan masyarakat yang diundang Presiden Joko Widodo untuk naik ke atas panggung juga menuturkan bahwa mereka memperoleh manfaat ekonomi dari produk hasil hutan bukan kayu (HHBK). Ashari Tukimin, salah satu warga yang tergabung dalam Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mangunan menuturkan bahwa saat ini dia mengelola 6 hektar lahan hutan untuk dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ulat sutera. “Alhamdulillah keluarga saya sejahtera,” tutur Ashari.

Presiden Joko Widodo menyadari potensi hutan Indonesia yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan namun juga dapat menghadirkan manfaat sosial dan ekonomi melalui berbagai alternatif usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat bersama para pihak. “Sejak empat tahun lalu saya perintahkan

dibentuk KPH untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Saya mau ini diteruskan dan jangan berhenti,” tegas Presiden Joko Widodo.

KPH merupakan unit pengelola hutan di tingkat tapak yang berperan penting dalam pengelolaan hutan untuk dapat menjamin fungsi ekologis, ekonomi dan sosial dari keberadaan hutan. Dalam laporannya Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan, “KPH merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam membenahi tata kelola hutan Indonesia.” Lebih lanjut, Menteri Siti menekankan keberadaan KPH akan memberi kepastian areal kerja dan menghindari **open access**, memastikan wilayah tanggung jawab pengelolaan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengembangan usaha, meningkatkan legitimasi status kepastian hukum wilayah kelola hutan, dan untuk terlaksananya kriteria dan standar

pengelolaan hutan lestari. Festival KPH Tingkat Nasional dan PUSAKA menyajikan pengalaman-pengalaman dari para KPH di tingkat tapak dalam perwujudan produktivitas hutan lestari yang lebih dinamis dan manfaatnya bisa langsung dinikmati oleh masyarakat sekitar hutan.

Diharapkan kegiatan ini akan membangun citra dan membangun kapasitas seluruh **stakeholder** lingkungan hidup dan kehutanan agar lebih siap dalam berbenah diri, membuka diri dan berani maju sebagai eksekutor kelestarian hutan Indonesia.



Gambar 2. Presiden Joko Widodo bersama perwakilan Petani Ulat Sutra, Bakti Rimbawan KPHP Banakat dan Perusahaan bidang Kehutanan Foxstars Group



Gambar 3. Tari Sembah Pembuka oleh Suryo Art & Dance melibatkan UKM Tari Diradha Sumirat Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta (STIPRAM)

Kegiatan Festival KPH Tingkat Nasional dan Pameran Usaha Kehutanan (PUSAKA) Tahun 2018 di Hutan Pinus Mangunan, Yogyakarta

Oleh : Nurul Huda, A.Md
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Iestari



Gambar1.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyerahkan bibit Nangka secara simbolis kepada Camat Dlingo, Lurah Mutung, dan Ketua Koperasi.



Gambar2.
Penerima Simbolis beasiswa diwakili dari, SDN Kembang Janggut 11 Prov. Kaltim, SDN Mangunan DIY, SMPN 4 Sanggau Prov. Kalbar, SMPN 2 Dlingo DIY, SMKN 1 Tanjung Palas Utara Prov. Kaltim, SMAN 1 Dlingo DIY, Fak.Teknik UNRI, STT Nasional Yogyakarta



Gambar3.
Kegiatan Minum Madu Bersama dengan melibatkan seluruh pengunjung Festival KPH Tingkat Nasional dan Pameran Usaha Kehutanan di Hutan Pinus Mangunan, Yogyakarta menjadi sarana sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat



Gambar 4.
Penyanyi Opie Andaresta bersama Suara Anak Bumi (Nalu, Luna, dan Kai) mengajak masyarakat menanam pohon melalui sebuah lagu yang mereka bawakan dengan judul "Ayo Tanam Pohon" pada pembukaan Festival KPH Tingkat Nasional dan Pameran Usaha Kehutanan Tahun 2018.



Gambar 5.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menandatangani Prasasti Festival KPH Tingkat Nasional dan PUSAKA, Wana Wisata Budaya Mataram dan Xylarium Bogoriense.



Gambar 6.
Booth Pameran Produk Pangan KPHP (Jagung, Padi, Singkong, Sagu, Lempok Durian dll)



60 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia - Jepang, Ditjen PHPL Pamerkan Produk KPHP dalam Festival Indonesia Di Hibiya Park, Tokyo, Jepang

Oleh : Ar. Taufiq Hidayatulloh

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Dalam rangka memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang Tahun 2018, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menyelenggarakan Pameran Festival Indonesia pada tanggal 28-29 Juli 2018 di Hibiya Park, Tokyo, Jepang. Hubungan diplomatik Indonesia-Jepang dimulai sejak tanggal 20 Januari 1958 sebagai mitra strategis. Indonesia dan Jepang telah menjadi mitra strategis dalam berbagai bidang, tidak hanya ekonomi dan politik, namun juga sosial dan budaya, persahabatan yang terjalin antara Indonesia dan Jepang terus meningkat, tidak hanya antarnegara, dan akan berproses menjadi persahabatan antarmasyarakat.

Festival Indonesia tahun 2018 sebagai wahana diseminasi kinerja dan capaian keberhasilan pembangunan nasional Indonesia, Promosi produk-produk unggulan Indonesia untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dan peningkatan ekowisata, memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi kekayaan budaya seni dan potensinya kepada Pemerintah dan masyarakat Jepang. Peserta pameran berasal dari berbagai pihak antara lain : Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Swasta, Asosiasi/kelompok Masyarakat, Lembaga

Swadaya Masyarakat. Sasaran pengunjung adalah kalangan Pemerintah Pusat dan Daerah Jepang, Swasta, Investor, kelompok masyarakat, dan warga Jepang yang mempunyai minat dan perhatian terhadap Indonesia serta Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Jepang.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Puan Maharani) membuka rangkaian acara Festival Indonesia di Hibiya Park, Tokyo. Festival Indonesia di Hibiya Park dikemas dalam bentuk pagelaran budaya yang melibatkan kedua negara. Festival ini juga dirangkai dengan pameran produk-produk kerajinan tangan asal Indonesia serta pertunjukan seni dan budaya. Sembari

menikmati suguhan seni dan pagelaran budaya, festival ini juga menghadirkan sejumlah anjungan untuk menjelaskan Indonesia dan Jepang dari berbagai sudut pandang.

Acara ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Yang Ke-5 Megawati Soekarno Putri, Duta Besar Indonesia Untuk Jepang Arifin Tasri, Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (Anak Agung Gede Ngurah Puspayogi), Walikota Kesennuma, Prefektur Miyagi Mr. Shigeru Sugawara, Utusan Khusus Presiden untuk Jepang Rahmat Gobel, Parliamentary Vice Minister Kementrian Luar Negeri Mr. Iwao Horii, Wakil Ketua Japan Indonesia Association Mr. Kojiro Shiojiri dan Presiden Direktur PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia.



Gambar 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Puan Maharani) membuka Festival Indonesia di Hibiya Park, Tokyo, Jepang

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari berpartisipasi dan berkontribusi dalam Festival Indonesia dengan menampilkan produk-produk hasil hutan dari beberapa Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (KPHP) dan Asosiasi yang membidangi Kehutanan. Produk KPHP berasal dari KPH Tabalong, KPH Tanah Laut, KPH Kusan, KPHP Kerinci, KPHP Batulanteh, KPHP Kayu Tangi, KPH Limau Unit VIII Hulu Sarolangun, KPHP Pulau Laut Sebuku, KPHP Lakitan, KPH Yogyakarta, KPH Unit VI Gorontalo, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Indonesian Sawmill and Wood Association (ISWA). Produk yang ditampilkan dalam pameran tersebut adalah produk Panel Kayu MDF dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti Pasak Bumi Coffee, Danum Cantung, Permen Gula Aren, Serbuk Kayu Manis, Stik Kayu Manis, Kopi Sako, Kawa Daun, Jamur Krispi, Madu Kelulut, Beras Keramat, Madu



Gambar 2.
Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Istanto, M.P.) Menawarkan produk Kopi dari KPHP Kerinci kepada Pengunjung

Pahit, Madu Manis Salang Kerinci, Madu Limau, Minyak Kepayang, Sabun Kepayang, Madu Sumbawa, Gula Aren, Minyak Kemiri, Serai Wangi, Minyak Kayu Putih, Kopi Toraja, Wedang Jahe Merah, Permen Gula Soba, Gula Semut Original, Roti Cookies Fantasi Pala.

Pengunjung sangat tertarik terhadap produk-produk yang dipamerkan. Produk yang paling diminati adalah Gula Aren, Minyak Kayu Putih dan Madu dari Kalimantan Selatan (Kelulut dan madu Pahit).

Atase Kehutanan Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo (DR. Riva Rovani) kedepan berencana memfasilitasi KPHP untuk ekspose di Jepang dengan tujuan agar investor Jepang melirik produk-produk KPHP baik produk Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu maupun Jasa Lingkungan.



Gambar 3.
Atase Kehutanan (DR. Riva Rovani) sedang menjelaskan kepada Penguinjung Bahwa produk KPHP bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Sekilas tentang *Exchanging Experiences for Sustainable Land and Resources Management Including in Peatlands* di Wageningen University, Belanda

Oleh : Andi Adriana We Tenri Sau, S.Hut, M.For.Sc
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Wageningen University, Belanda (24-25 Okt 2018), dilaksanakan workshop *Exchanging Experiences for Sustainable Land and Resources Management Including in Peatlands*. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari *Wageningen University* (Prof. Dr. Lars Hein, Dr. Dirk Hoekman dan Dr. Aritta Soewarno), *Wetlands Internasional* (Dr. Arthur Neher) dan *Van Hall Larenstein University of Applied Sciences* (Dr. Peter van der Meer) dan pihak Delri.

Workshop dibuka dengan *welcoming remarks* dari Prof. Dr. Lars Hein dari *Wageningen University* sekaligus berkesempatan membuka acara workshop ini. Selanjutnya, Ir. Istanto, M.Sc, Direktur UHP, Ditjen PHPL selaku Ketua Delri menyampaikan *remarks* mewakili Pemerintah RI. Secara khusus, Ketua Delri menyampaikan pentingnya lahan gambut bagi Indonesia, berbagai langkah penting telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan. Input dari pihak akademisi dan praktisi di Belanda akan memperkaya dan sekaligus sebagai pembelajaran bagi Indonesia dalam mengelola lahan gambut.

Pada workshop ini disampaikan dengan paparan dari *Wageningen University*, *Wetlands Internasional* dan *Van Hall Larenstein University of Applied Science*, serta

diskusi antara kedua belah pihak dimana hal-hal penting yang disampaikan dalam diskusi diantaranya:

- 1) *Wageningen University* bekerja sama dengan BPS Indonesia telah melaksanakan kegiatan *System of Enviromental Economic Accounting* yang menghitung output ekonomi dari masing-masing sektor dengan memperhitungkan kontribusi ecosystem ke dalam pencatatan sumber daya alam. Tanpa *environmental accounting* maka dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak akan tercermin dalam GDP suatu negara.
- 2) Saat ini tanaman sagu merupakan tanaman yang paling cocok untuk dikembangkan di lahan gambut. Perlu penelitian lebih lanjut sebelum diberikan rekomendasi.
- 3) Pihak *Wageningen University*, *Wetlands Internasional* dan *Van Hall Larenstein University of Applied Science* bersedia melakukan kerjasama dengan KLHK terkait pengelolaan lahan gambut di Indonesia.

Tindak lanjut dari pelaksanaan workshop ini yaitu kolaborasi penelitian antara pihak akademisi dan praktisi di Belanda dengan pihak APHI dan KLHK (lokus di KPHP), terutama terkait *peatland ecosystem valuation and accounting*, kemudian melakukan high level discussion antara pihak KLHK (Tim Kerja Gambut) dengan pihak akademisi dan praktisi di Belanda terkait pengelolaan lahan gambut berkelanjutan.

Liputan singkat Indonesia – Finland Joint Working Group (JWG) on Forestry and Natural Resources Management ke-2 di Helsinki, Finlandia

Oleh :
Andi Adriana We Tenri Sau, S.Hut, M.For.Sc
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Helsinki, Finlandia, Tim Direktorat Jenderal PHPL melaksanakan pertemuan dengan TAPIO Oy/TAPIO Ltd (20/10/2018), yang merupakan BUMN milik Pemerintah Finlandia di bidang Kehutanan. Pada kesempatan tersebut dijelaskan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan di Finlandia, dimana 75% area Finlandia merupakan kawasan berhutan (luas : 23 juta hektar), dengan kepemilikan 53% hutan rakyat (private family forest), 35% hutan negara dan sisanya 12% hutan industri. Sektor Kehutanan memegang peranan yang cukup penting dalam perekonomian Finlandia dengan total kontribusi 4.1% dari GDP dan 21.7% dari nilai ekspor nasional.

Selanjutnya pada pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Finlandia dan Estonia (21/10/2018), Ibu Wiwiek Setyawati Firman, diampaikan bahwa dari 4 (empat) Dari 4 (empat) MoU RI-Finlandia, MoU Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan yang paling aktif dari lainnya. Untuk itu, KBRI Helsinki siap mendukung program Delri dan berharap JWG akan lahirkan kesepakatan konkrit.

Diharapkan kehadiran Delri tidak bersifat teknis semata serta untuk tapping expertise dari Finlandia, tetapi juga memiliki aspek politik dan ekonomi. Dalam JWG, Delri berkesempatan untuk memberi informasi terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus untuk mengkonter pemberitaan media asing terkait deforestasi di Indonesia, penting bagi Indonesia menjaga

hubungan dengan Finlandia, karena posisi Finlandia dalam Uni Eropa sangat pro Indonesia.

Pelaksanaan *Indonesia – Finland Joint Working Group (JWG) on Forestry and Natural Resources Management ke-2* (22/10/2018) bertempat di Gedung *House of Estates*, Helsinki, Finlandia. Delri dipimpin oleh Direktur Usaha Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dengan 18 anggota Delegasi dari unsur KLHK (Direktorat Usaha Hutan Produksi, Sekretariat Ditjen PHPL, Pusat Penelitian dan Pembangunan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah V Palembang, BP2LHK Manado), perwakilan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), perwakilan dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, Universitas Hasanuddin, Makassar dan KBRI Finlandia.

Delegasi Finlandia dipimpin oleh Dr. Taneli Kolström, Vice President *Natural Resources Institute Finland* (Luonnonvarakeskus/LUKE) dengan anggota Delegasi dari unsur Kementerian Pertanian dan Kehutanan, Finlandia, LUKE, TAPIO Oy/TAPIO Ltd., University of Helsinki, Finnish Forest Association (FFA), Arbonaut Ltd., MHG Systems Ltd., dan FCG International Oy.

JWG dimulai dengan *welcoming remarks* dari Dr. Juha Niemelä, *Director General Natural Resources Department*, Kementerian Pertanian dan Kehutanan Finlandia sekaligus berkesempatan membuka

acara JWG ini. Selanjutnya, Ir. Istanto, M.Sc, Direktur UHP, Ditjen PHPL selaku Ketua Delri menyampaikan remarks mewakili Pemerintah RI.

JWG ditutup dengan *concluding remarks* yang disampaikan oleh Dr. Kolström yaitu:

- 1) Perlunya melakukan peningkatan kerjasama yang telah terjalin dengan cara:
 - i. Pelatihan secara kontinu antara HAMK dan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - ii. Pelatihan oleh *Forest Academy* di bidang *communication skills* bagi para pembuat kebijakan;
 - iii. Melanjutkan kembali bidang-bidang kerjasama yang pernah terbentuk sebelumnya;
 - iv. Dialog lebih lanjut mengenai skema pembiayaan terutama untuk kerjasama pertukaran akademisi, peneliti atau pelajar.
- 2) Sejumlah potensi bidang kerjasama baru sedang dipersiapkan untuk diajukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:
 - i. Skema dan sumber pembiayaan baik di tingkat nasional dan internasional;
 - ii. LUKE membuka kesempatan kolaborasi untuk proyek Horizon 2020;
 - iii. Mengajukan proposal untuk pertemuan JWG berikutnya akan dilaksanakan di Indonesia pada 2019.

Tim Ditjen PHPL kemudian melakukan *field visit* (23/10/2018) ke wilayah Hämeenlinna dan mengunjungi perusahaan penggergajian kayu Versowood, melihat langsung pengelolaan hutan di Evo forest dan lahan gambut di Vapo, serta mengunjungi HAMK.

Secara umum rangkaian pelaksanaan JWG *on Forestry and Natural Resources Management* ke-2 ini telah berjalan dengan lancar. Pelatihan yang diikuti oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama 6 minggu merupakan hasil konkrit MoU RI-Finlandia di Bidang Kehutanan dan Pengelolaan SDA. Ke depan, KLHK berencana untuk melanjutkan konsep note dari BLI KLHK menjadi full proposal serta mengirimkan pejabat ke Finlandia untuk bertukar informasi dan berdiskusi dengan pelaku pengelola lahan gambut. Terkait sumber anggaran untuk membiayai implementasi dari JWG, maka Indonesia dan Finlandia akan bersama-sama mencari sumber pendanaan untuk implementasi tersebut.

Dari hasil pelaksanaan JWG ke-2 di Finlandia, disampaikan masukan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan *high level dialogue* dan pertukaran informasi dari pihak KLHK dengan pihak di Finlandia terkait pengelolaan lahan gambut dan praktek silvikultur sebagai bagian dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
- b. TAPIO Oy telah menyusun agenda (kurikulum) training manajemen hutan untuk high level (decision maker) selama 2 minggu di Finlandia.
- c. JWG ke-3 akan dilaksanakan di Indonesia berbarengan dengan pelaksanaan (International Indonesia Forestry Researcher (INAFOR) tahun 2019. Perlunya pihak KLHK dan Kementerian Pertanian dan Kehutanan Finlandia menyusun suatu proposal kegiatan terkait implementasi Silin dan pengelolaan gambut di KPHP dengan pendanaan bersumber dari pihak ketiga.

Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Oleh: Devi Permata Sari, S.Hut.
Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Dalam pengelolaan kawasan hutan pada tingkat tapak, dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Pembentukan KPH merupakan penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.



Penilaian RPHJP oleh Direktorat KPHP.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, KPH harus menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang akan dijadikan dasar pemanfaatan kawasan hutan di wilayahnya. Setelah RPHJP disusun, selanjutnya harus disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk.



Presentasi usulan RPHJP yang akan dinilai.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pejabat yang berwenang mengesahkan RPHJP KPHP melimpahkan kewenangan melalui pendelegasian pengesahan RPHJP KPHP kepada Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Pengesahan RPHJP KPHP diawali dengan verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJP. Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut telah sesuai sesuai ketentuan secara formil dan materiil, maka RPHJP disahkan oleh Direktur KPHP. Namun dalam hal hasil verifikasi dan validasi terdapat materi substansi yang belum lengkap maka harus diperbaiki, dan setelah diperbaikinya memenuhi ketentuan dapat disahkan.



Salah satu KPHP setelah presentasi RPHJP

Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi, Direktur KPHP dibantu oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Tim ini bertugas memberikan penilaian terhadap dokumen RPHJP yang akan dipresentasikan oleh Kepala KPHP.



Tim penilai usulan RPHJP.

Prioritas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada Tiga Kabupaten di Papua Barat

Oleh : Freddy Jontara Hutapea
Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manokwari

Tanggal 23-25 Oktober 2018, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Maluku Papua melaksanakan *workshop* dengan tema “Sinergi Dukungan Para Pihak Dalam Percepatan Pencapaian Akses Perhutanan Sosial di Provinsi Papua Barat”. Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mengenai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) prioritas untuk dikembangkan pada 3 (tiga) Kabupaten di Papua Barat: Sorong Selatan, Manokwari Selatan, dan Fakfak. Pemilihan HHBK ini umumnya didasarkan pada manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat dan ketersediaannya pada masing-masing daerah. Berikut jenis HHBK prioritas yang akan dikembangkan pada 3 (tiga) kabupaten di Papua Barat, yaitu:

1. Sagu (*Metroxylon sagu*)

Sagu merupakan komoditi yang melimpah di Papua. Flach (1997) memperkirakan bahwa Papua memiliki lebih dari 1,2 juta ha hutan sagu yang tersebar di beberapa wilayah seperti Bintuni, Salawati, Teminabuan, Mimika, Merauke, Wasior, Serui, Waropen, Mamberamo, Sarmi, dan Sentani. Hutan sagu di Papua merupakan yang terluas di dunia. Selain luasan, Papua juga memiliki keanekaragaman jenis sagu yang tinggi.

Sagu merupakan sumber karbohidrat yang baik. Kandungan karbohidrat yang dimiliki sagu lebih tinggi dibandingkan dengan komoditi lainnya seperti beras, jagung, kentang, dll. (Tabel 1). Sagu sangat potensial untuk dikembangkan menjadi mi sagu, roti, biskuit, dan mutiara sagu.

Tabel 1. Kandungan nutrisi beberapa komoditi penghasil karbohidrat (Bantacut, 2014).

KOMODITI	KANDUNGAN (% BERAT KERING)				ENERGI (KALORI)
	AIR	KARBOHIDRAT	PROTEIN	LEMAK	
Beras	12,00	80,00	7,00	0,50	359,70
Tepung beras	13,00	90,69	7,82	0,80	401,26
Tepung terigu	12,00	87,84	10,11	1,48	405,11
Singkong segar	59,4	92,92	1,71	0,49	157,00
Tepung singkong	12,10	93,04	2,43	0,77	393,75
Tapioka	12,00	86,90	0,50	0,30	362,00
Jagung	24,00	83,68	10,39	4,47	416,58
Ubi jalar	68,50	88,57	5,71	2,22	397,14
Kentang	64,00	93,61	2,50	1,11	394,44
Pati sagu	14,7	98,49	0,82	0,23	353,00

Meningkatnya perhatian terhadap bioenergi juga memberi angin segar terhadap pemanfaatan sagu. Dengan kandungan karbohidrat yang dimilikinya, sagu merupakan sumber daya potensial untuk dikembangkan sebagai bahan baku

pembuatan bioetanol. Hasil studi Ishizaki (2007) dalam Syakir & Karmawati (2013) (Tabel 2) menunjukkan bahwa produksi bioetanol dari sagu lebih tinggi dibandingkan dengan tebu, ketela pohon, dan jagung.

Tabel 2. Produksi karbohidrat dan bioetanol beberapa komoditi (Ishizaki, 2007 dalam Syakir & Karmawati, 2013).

KOMODITI	PRODUKSI (ton/ha)	PRODUKSI KARBOHIDRAT (ton/ha)	PRODUKSI BIONETANOL (kl/ha)
Sagu	20,00	20,00	12,20
Jagung	5,00	5,00	3,00
Tebu	70,00	10,00	6,40
Ketela Pohon	25,00	6,25	3,80

2. Masoi (*Cryptocarya massoy*)

Masoi merupakan komoditi HHBK penghasil minyak atsiri yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tumbuhan ini merupakan jenis endemik Papua yang menyebar di beberapa daerah seperti Manokwari, Sorong, Nabire, Biak Numfor, Yapen Waropen, Merauke, dan Jayapura (Remetwa, 2000).

Produk utama yang dihasilkan oleh masoi adalah minyak masoi. Minyak masoi dapat diperoleh dengan mengekstrak bagian kulit, kayu teras, dan buah masoi. Kandungan utama minyak masoi adalah senyawa masoilakton.

Gambar 1. Pemanenan kulit masoi oleh masyarakat. (Foto: Freddy J. Hutapea).



Tabel 3. Komponen kimia minyak masoi dari bagian kulit, kayu teras, dan buah (Rali *et al.*, 2007).

KOMPONEN KIMIA	MINYAK DARI KULIT (%)	MINYAK DARI KAYU TERAS (%)	MINYAK DARI BUAH (%)
α -pinene	-	-	0,2
β -pinene	-	-	0,3
limonene	-	-	0,4
linalool	0,9	-	-
borneol	0,7	-	-
α -cubebene	-	-	0,3
α -copaene	-	-	2,1
β -elemene	-	-	1,3
β -caryophyllene	-	-	12,9
α -humulene	-	-	2,2
E,E- α -farnesene	-	-	1,3
C-10 massoia lactone	64,8	64,8	1,4
ledene	-	-	0,2
β -bisabolene	1,4	-	-
δ -cadinene	-	-	1,2
<i>cis</i> -calamene	-	-	0,2
δ -decalactone	-	2,5	-
caryophyllene oxide	-	-	2,2
C-12 massoia lactone	17,4	2,7	0,2
benzyl benzoate	13,4	-	68,3
benzyl salicylate	-	-	1,8
C-14 massoia lactone	-	1,4	-

3. *Agathis (Agathis labillardieri)*

A. labillardieri merupakan tumbuhan endemik Papua. Tumbuhan ini merupakan satu-satunya jenis *Agathis* yang terdapat di Papua, dan banyak terdapat di Kabupaten Sorong Selatan. Produk utama yang dihasilkan tumbuhan ini adalah kopal (Gambar 2), yang digolongkan kedalam kopal Manila. Kopal merupakan senyawa kimia dengan komposisi kompleks, tidak larut dalam air, larut dalam beberapa pelarut organik, rapuh, meleleh bila dipanaskan, dan mudah terbakar (Waluyo, Sumadiwangsa, Hastuti, & Kusmiyati, 2004). Kopal merupakan bahan dasar pembuatan berbagai produk seperti cat, vernis, tinta, dan kosmetik.



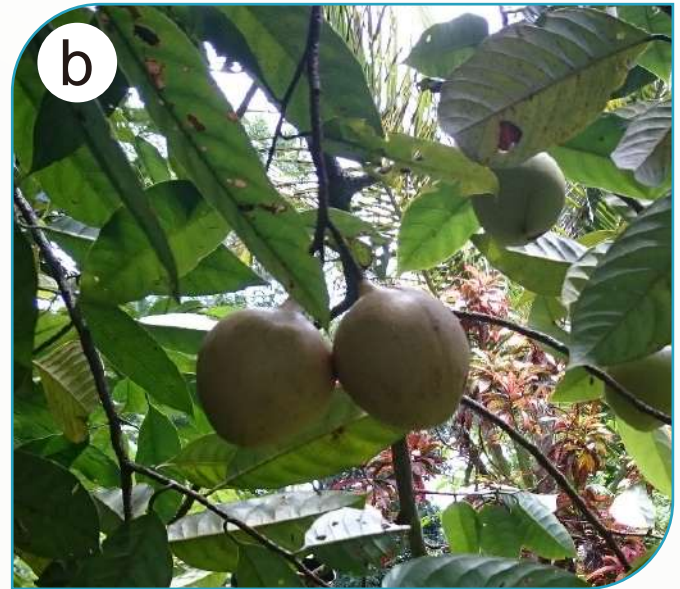
Gambar 2. Kopal yang dihasilkan dari *Agathis* spp. (Foto: Labshop)

4. Pala (*Myristica spp.*)

Pala merupakan HHBK prioritas untuk dikembangkan oleh Kabupaten Fakfak. Kabupaten Fakfak sering dijuluki sebagai kota pala karena berlimpahnya pala di daerah ini. Kabupaten ini

ditumbuhi oleh dua jenis pala yaitu pala Fakfak (*Myristica argentea*) dan pala Banda (*Myristica fragrance*).

Kedua jenis pala ini tidak hanya memiliki perbedaan karakteristik (Gambar 3), tetapi juga kualitas.



Gambar 3. Penampakan pala Fakfak (A) dan pala Banda (B). (Foto: Freddy J. Hutapea)

Padahal, daging buah pala ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk-produk ekonomis seperti sirup dan manisan pala.



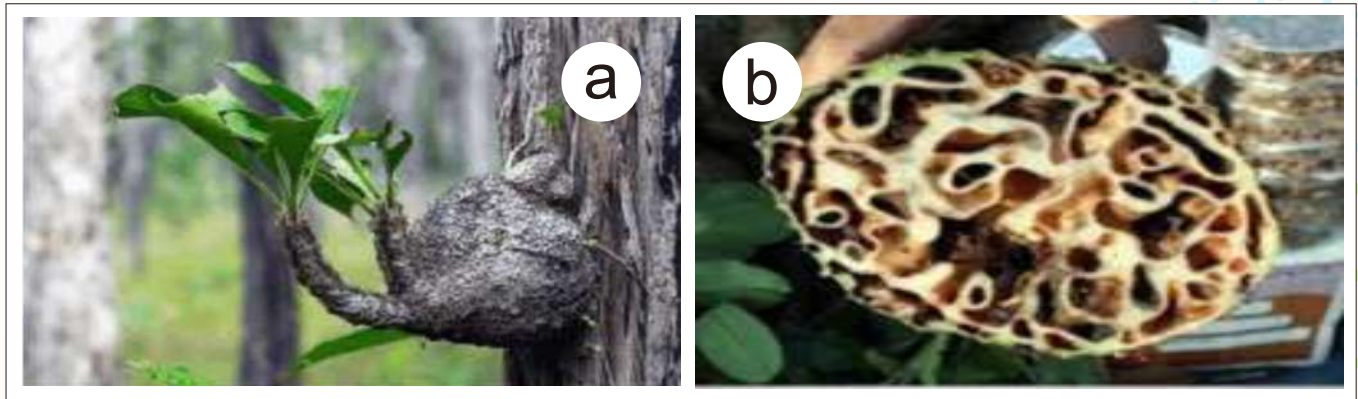
Gambar 4. Kualitas kemasan sirup pala (A) dan manisan pala (B) yang diproduksi masyarakat di Fakfak yang masih perlu dikembangkan. (Foto: Freddy J. Hutapea).

5. Sarang semut (*Myrmecodia pendans*)

Sarang semut (Gambar 5) merupakan tumbuhan epifit yang hidup menempel di batang pohon. Di Papua, tumbuhan ini dapat ditemukan di daerah Pegunungan Tengah tepatnya di

Jayawijaya, Tolikara, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, dan Paniai.

Sarang semut mengandung flavanoid, tanin, polifenol, tokoferol, magnesium, kalsium, besi, fosfor, natrium, dan seng (Ahmad & Lestari, 2011).



Gambar 5. Penampakan sarang semut (A) dan potongan umbi sarang semut (B). (Foto: Ahmad & Lestari, 2011).

6. Gaharu

Gaharu merupakan komoditi berbentuk gumpalan padat berwarna coklat kehitaman sampai hitam dan memiliki aroma yang wangi (Siran, 2014). Gaharu memiliki manfaat ekonomi yang sangat tinggi, dan dapat memberi keuntungan tidak hanya bagi masyarakat sekitar hutan tetapi juga bagi negara. Di pasar internasional, komoditi ini dikenal sebagai *agarwood*, *aloeswood*, dan *eaglewood*.

7. Kulilawang (*Cinnamomum culilawane*)

Kulilawang merupakan tumbuhan yang bernilai ekonomi tinggi di Papua. Tumbuhan ini merupakan penghasil minyak atsiri yang dikenal sebagai minyak lawang. Tumbuhan ini menyebar di beberapa wilayah di Papua seperti Kaimana, Fakfak, Sorong, Jayapura, Nabire, Merauke, dan Manokwari (Wahyudi, 2013).

8. Madu

Madu merupakan cairan manis yang dihasilkan oleh lebah madu (*Apis* sp.) dari sari bunga tanaman (*flora nectar*) atau bagian lain dari tanaman (Evahelda, Pratama, Malahayati, & Santoso, 2017). Papua memiliki prospek cerah dalam mengembangkan madu. Beberapa daerah seperti Jayapura, Jayawijaya, dan Yapen Waropen memiliki potensi pengembangan madu yang cukup baik (Wahyudi, 2013).

4. Gula aren

Gula aren merupakan HHBK yang dihasilkan dari nira yang disadap dari pohon aren (*Arenga pinnata*). Nira aren memiliki kandungan gula dalam bentuk sukrosa yang dapat diolah menjadi berbagai produk seperti gula aren dan bioetanol (Joseph & Layuk, 2012).

Kesimpulan

Jenis HHBK yang prioritas untuk dikembangkan di Papua Barat adalah sagu, masoi, kopal (*Agathis*), pala, sarang semut, kulilawang, madu, dan gula aren. Pengembangan HHBK ini diharapkan akan membawa manfaat yang sangat besar baik bagi masyarakat lokal Papua, maupun pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

- Ahmad, I., & Lestari, R. (2011). Isolasi antioksidan tumbuhan sarang semut (*Myrmecodia pendens* Merr & Perry) asal Papua. *Journal of Tropical Pharmacy and Chemistry*, 1(3), 196-201.
- Evahelda, E., Pratama, F., Malahayati, N., & Santoso, B. (2017). Sifat fisik dan kimia madu dari nektar pohon karet di Kabupaten Bangka Tengah, Indonesia. *Agritech*, 37(4), 363-368.
- Flach, M. (1997). *Sago palm (Metroxylon sagu Rottb.): promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops*. 13. Rome, Italy: International Plant Genetic Resources Institute.
- Hutapea, F. J. (2017). Masoi: hasil hutan bukan kayu Papua yang tidak terkelola dengan baik. *Buletin Tritonis*, 1, 35-36.
- Joseph, G. H., & Layuk, P. (2012). Pengolahan gula semut dari aren. *Buletin Palma*, 13(1), 60-65.
- Rali, T., Wossa, S. W., & Leach, D. N. (2007). Comparative chemical analysis of the essential oil constituents in the bark, heartwood and fruits of *Cryptocarya massoy* (Oken) Kosterm. (Lauraceae) from Papua New Guinea. *Molecules*, 12, 149-154.
- Remetwa, H. (2000). Pemetaan potensi dan penyebaran HHBK di Irian Jaya. *Buletin Penelitian Kehutanan*, 4(2), 15-28.
- Siran, S. A. (2014). Gaharu bioinduksi: komoditi elit masa depan sektor kehutanan. Dalam A. Susmianto, M. Syakir, M., & Karmawati, E. (2013). Potensi tanaman sagu (*Metroxylon* spp.) sebagai bahan baku bioenergi. *Perspektif*, 12(2), 57-64.
- Turjaman, & P. Setio (Eds.). *Rekam jejak: Gaharu inokulasi teknologi Badan Litbang Kehutanan*. Bogor: Forda Press.
- Wahyudi. (2013). *Buku pegangan hasil hutan bukan kayu*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Waluyo, T., Sumadiwangsa, E. S., Hastuti, P., Kusmiyati, E. (2004). Sifat-sifat kopal Manila dari Probolinggo, Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 22(2), 87-94.

Hutan Usaha Jasa Lingkungan Wisata Alam Pinus Mangunan Yogyakarta

Oleh: ...ndah Puspitaningsih
Balai KPH Yogyakarta

Hutan sebagai sebuah ekosistem selalu identik dengan perpaduan antara sumberdaya alam biotik dan sumberdaya alam abiotik. Keberadaan hutan telah memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat. Manfaat langsung yang dapat diperoleh antara lain berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Sedangkan manfaat tidak langsung dari hutan seperti menghasilkan oksigen, mencegah erosi, mengatur tata air, menjaga iklim, dan lainnya.

Dalam usaha pemanfaatan hutan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta melakukan pemanfaatan jasa lingkungan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Yogyakarta, Balai KPH Yogyakarta mengelola kawasan hutan seluas 15.090,40 ha yang merupakan hutan

lindung dan hutan produksi. Sesuai dengan upaya pemerintah dalam menekan kerusakan hutan, diperlukan solusi yang salah satunya melalui usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. Pengelolaan hutan wisata alam dapat mempertahankan kondisi fisik hutan sekaligus memperoleh manfaat sosial dan ekonomi.

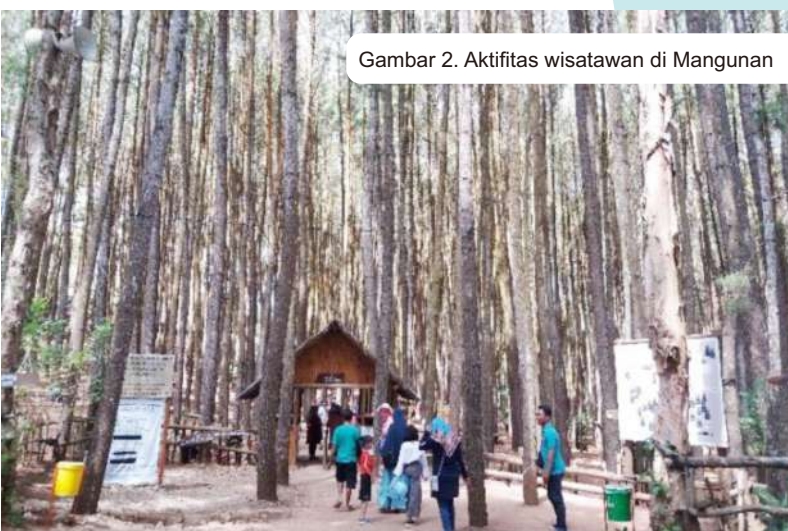
Wisata alam mangunan adalah bentuk pemanfaatan usaha jasa lingkungan yang berlokasi di kawasan hutan Balai KPH Yogyakarta, tepatnya di wilayah Bagian Daerah Hutan (BDH) Kulonprogo-Bantul, Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Mangunan. Sedangkan letak menurut wilayah administrasi pemerintahan berada di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Luas wisata alam tersebut mencakup luasan 24,97 Ha dari 570,70 Ha total luas hutan lindung di RPH Mangunan.

Gambar 1. Hutan Pinus di Mangunan



Wisata alam mangunan mulai dirintis pada tahun 2014 di blok Sudimoro III RPH Mangunan. Kawasan tersebut didominasi oleh tegakan monokultur pinus (*pinus merkusii*) yang sudah berhenti disadap. Rimbunnya tegakan pinus dan didukung iklim mikro yang sejuk menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung. Berkunjung ke wisata alam mangunan, pengunjung dapat menikmati panorama pinus dan disertai kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Swa foto di berbagai titik yang menarik untuk diabadikan.
2. Kegiatan seperti *gathering*, *outbond*, maupun *camping ground*.
3. Foto *Pre-wedding*.
4. Jelajah alam.



Gambar 2. Aktivitas wisatawan di Mangunan

Dengan dibukanya usaha pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam mangunan, Balai KPH Yogyakarta telah mempersiapkan wisata alam yang didukung oleh sistem pengelolaan wisata yang tersinergi dengan baik. Pengunjung diberikan kenyamanan berwisata dengan kelengkapan sarana, prasarana yang memadai serta kebersihan yang selalu dijaga.

Wisata alam mangunan dikelola dengan sistem kerjasama antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Yogyakarta dengan masyarakat setempat dinaungi Koperasi Notowono. Sesuai



Gambar 3. Potensi Sumberdaya Alam Biotik di Hutan Pinus Mangunan

kerjasama tersebut, disepakati bagi hasil antara pemerintah daerah sebesar 25% dan masyarakat sebesar 75%.

Usaha pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam telah mendorong perekonomian masyarakat setempat. Anggota yang sebelumnya mengandalkan hasil sadap getah dan tumpangsari dari lahan andil kawasan hutan, namun sekarang terbantu dengan memperoleh pendapatan tambahan dari sektor wisata alam. Hingga saat ini anggota pengelola wisata yang tergabung di Koperasi Notowono mencapai 544 orang. Selain manfaat ekonomi, masyarakat setempat ikut dilibatkan dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan wisata alam, seperti ide atau usulan dalam pengembangan obyek wisata.

Bagi pemerintah daerah Yogyakarta, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disumbangkan dari wisata alam mangunan jauh lebih besar daripada hasil getah pinus. Pendapatan yang diperoleh saat pinus masih disadap berkisar antara Rp. 300-400 juta/tahun. Namun saat dimanfaatkan menjadi wisata alam mampu menghasilkan PAD hingga sebesar Rp. 1,9 miliar di tahun 2017.

Guna mengantisipasi penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas usaha pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam, pengelola melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi hal tersebut dengan melakukan pemeliharaan tegakan, adanya rehabilitasi, dan menyertakan himbauan-himbauan agar pengunjung tertib pada peraturan yang berlaku di wisata alam mangunan.

Pembuatan Daerah Penyangga Habitat Lebah Untuk Mendukung Kelestarian Pengelolaan Madu Hutan di KPHP Rote Ndao dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis

Oleh: Neny Triana, S.Hut
BPHP Wilayah VII Denpasar

Berdasarkan RPHJP KPHP Rote Ndao Tahun 2015-2024 diketahui bahwa Kabupaten Rote Ndao merupakan kabupaten paling selatan di Indonesia dan merupakan daerah pemekaran dari kabupaten Kupang. Kabupaten Rote Ndao ini mempunyai luas wilayah 128.010 Ha yang terdiri dari 96 pulau dimana 6 pulau berpenghuni (P. Rote, P.Usu, P. Ndao, P. Nuse, P.Landu, dan P. Do'o) dan 90 pulau lainnya tidak dihuni manusia.

Wilayah KPHP Model Kabupaten Rote Ndao secara administrasi terletak menyebar di sembilan kecamatan Kabupaten Rote Ndao, antara lain Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut dan Kecamatan Rote Barat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. SK. 333/Menhut-II/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Luas Wilayah KPHP Model Rote Ndao adalah 40.595 Ha yang terdiri dari 15.978 Ha di Kawasan Hutan Lindung dan 24.617 Ha di Kawasan Hutan Produksi yang kemudian mengalami perubahan sesuai dengan SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 Tanggal 14 mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa

tenggara Timur sehingga luas wilayah kerja KPHP Model Rote Ndao adalah 17.019,84 Ha yang terdiri dari 7.652,37 Ha di Kawasan Hutan Lindung dan 9.367,47 Ha di Kawasan Hutan Produksi.

Secara geografis Kabupaten Rote Ndao terletak antara 10° 25' – 11° 00' LS dan 121° 49' – 123° 26' BT dengan batas sebelah Utara Laut Sawu, sebelah timur berbatasan dengan Selat Pukuafu, sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sawu, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Secara garis besar wilayah KPHP Model Rote Ndao masuk dalam wilayah administrasi kecamatan yang terdiri dari kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah dikemukakan pada point ke tiga yang mana fungsi kawasan ini kemudian dikelompokkan kedalam blok dan petak. Pembagian blok dilakukan dengan memperhatikan karakteristik biofisik lapangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, potensi sumberdaya alam, dan keberadaan hak-hak izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Selain itu pembagian blok juga harus mempertimbangkan peta arahan pemanfaatan sebagaimana diarahkan oleh Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan fungsi kawasan hutan di wilayah kelola KPHP Model Rote Ndao. Hasil pembagian blok/petak areal KPHP Model Rote Ndao secara rinci disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pembagian Blok Arahkan Pengelolaan KPHP Model Rote Ndao

NO	BLOK ARAHAN	LUAS (Ha)	PERSEN (%)
1	HL - Inti	3,774,08	22,17
2	HL - Pemanfaatan	3,878,29	22,79
3	HP - Pemberdayaan Masyarakat	461,28	2,71
4	HP - HHK - Hutan Tanaman	6,586,34	38,70
5	HP - Jasling - HHBK	1,569,32	9,22
6	HP - Perlindungan	750,53	4,41
	JUMLAH	17,019,84	100,00

Sumber : Hasil Analisis Data Tahun 2014 dalam RPHJP KPHP Rote Ndao 2015-2024

Berdasarkan hasil inventarisasi HHBK madu di tahun 2017 berhasil diidentifikasi 30 pohon dan 1 tebing batu yang menjadi sarang lebah madu. Adapun rinciannya adalah 12 pohon di RPH Rote Selatan, 10 Pohon di RPH Landuleko, 1 pohon di RPH Rote Barat, 1 tebing batu di RPH Rote Barat, 1 pohon di

RPH Rote Tengah, 1 pohon di RPH Lobalain dan 5 pohon di RPH Rote Barat Daya. Jenis-jenis pohon yang menjadi sarang lebah madu adalah tetak, nitas, bonak, jambu hutan, mangrove, beringin dan lalanok. Berikut adalah titik koordinat pohon yang menjadi sarang lebah madu:

Tabel 2. Koordinat Sarang Lebah Madu di KPHP Rote Ndao

NO	LOKASI POHON SARANG LEBAH	JUMLAH POHON PER RPH	TITIK KOORDINAT		KETERANGAN	
			X	Y		
1	Rote Selatan	1	123,2144444	-10,772	Tetak	6 koloni
2	Rote Selatan	2	123,2142778	-10,7726111	Tetak	Blm ada *
3	Rote Selatan	3	123,2147222	-10,7728056	Tetak	18 koloni
4	Rote Selatan	4	123,2147222	-10,7722778	Tetak	Blm ada *
5	Rote Selatan	5	123,2048889	-10,7806389	Tetak	16 koloni
6	Rote Selatan	6	123,2054444	-10,78025	Tetak	15 koloni
7	Rote Selatan	7	123,2053333	-10,7801111	Tetak	6 koloni
8	Rote Selatan	8	123,1746111	-10,7702222	Beringin	Blm ada*
9	Rote Selatan	9	123,1745833	-10,7727222	Tetak	Blm ada*
10	Rote Selatan	10	123,1749722	-10,7704722	Beringin	Blm ada*
11	Rote Selatan	11	123,1753333	-10,77	Tetak	18 koloni
12	Rote Selatan	12	123,2048889	-10,7713056	Beringin	Blm ada*
13	Landuleko	1	123,3652222	-10,4982222	Tetak	Blm ada
14	Landuleko	2	123,3653611	-10,4982222	Bonak	3 koloni
15	Landuleko	3	123,3652778	-10,4982778	Bonak	Blm ada
16	Landuleko	4	123,364	-10,4991944	Nitas	1 koloni
17	Landuleko	5	123,3639167	-10,4992222	Nitas	8 koloni
18	Landuleko	6	123,364	-10,4992778	Jambu hutan	1 koloni
19	Landuleko	7	123,3480556	-10,4988889	Tetak	44 koloni
20	Landuleko	8	123,3480556	-10,4988611	Tetak	2 koloni
21	Landuleko	9	123,3445833	-10,4895278	Nitas	36 koloni
22	Landuleko	1	123,2806944	-10,57175	Beringin	9 koloni

23	Rote Barat	1	122,8851667	-10,8607778	Beringin	9 koloni
24	Rote Barat	2	122,8714167	-10,8727222	Tebing Batu	11 koloni
25	Rote Tengah	1	123,1813056	-10,7131944	Lalanok	17 koloni
26	Lobalain	1	123,1737222	-10,822	Mangrove	3 koloni
27	Rote Barat Laut	1	122,9070278	-10,7516389	Mangrove	4 koloni
28	Rote Barat Laut	2	122,907	-10,7516944	Mangrove	19 koloni
29	Rote Barat Laut	3	122,9016389	-10,7516667	Mangrove	3 koloni
30	Rote Barat Laut	4	122,92	-10,8191944	Beringin	12 koloni
31	Rote Barat Laut	5	122,9301111	-10,7422778	Mangrove	4 koloni

Sumber: Data Primer Inventarisasi HHBK Madu di KPHP Rote Ndao 2017

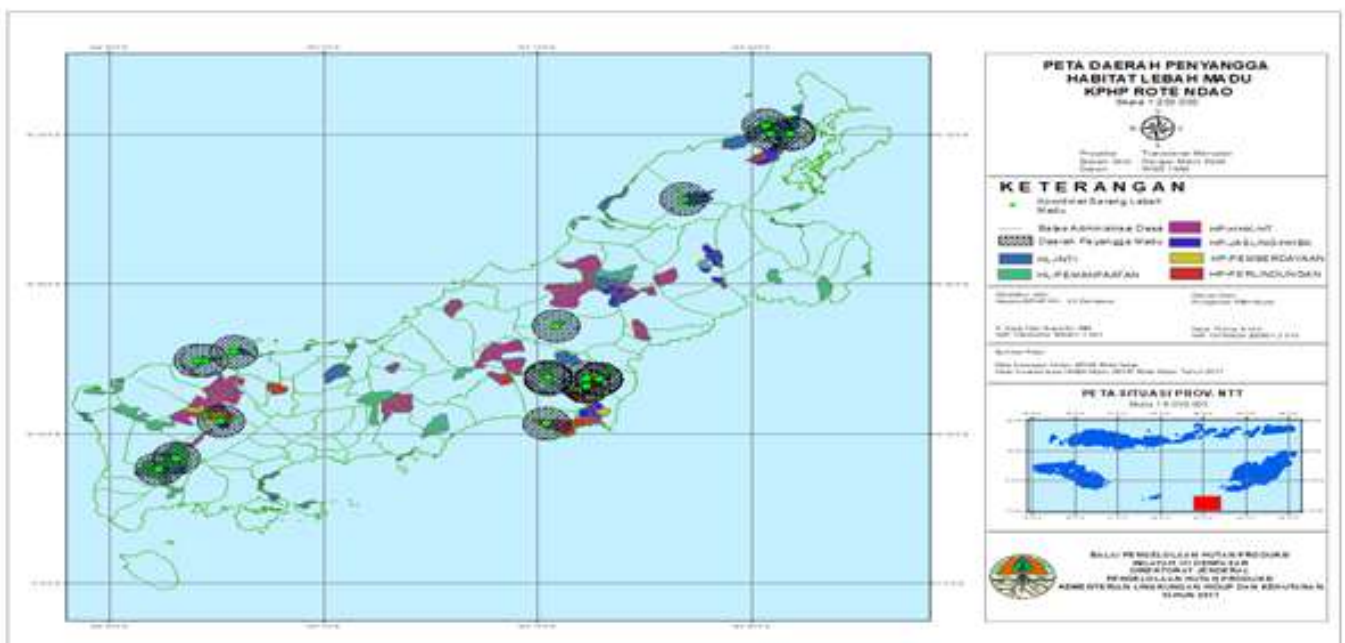
* Berdasarkan wawancara dengan masyarakat sebelum tahun 2016 terdapat koloni lebah

Berdasarkan titik koordinat sarang lebah ini dibuat daerah penyangga dengan jarak 2 km. Pemilihan jarak buffering 2 km, karena kemampuan terbang maksimalnya (radius terbang) dalam mencari nektar dan tepung sari mencapai radius 1-2 km, walaupun lebah pekerja dapat terbang lebih dari itu yaitu 2-3 Km (Mooy, 2017).

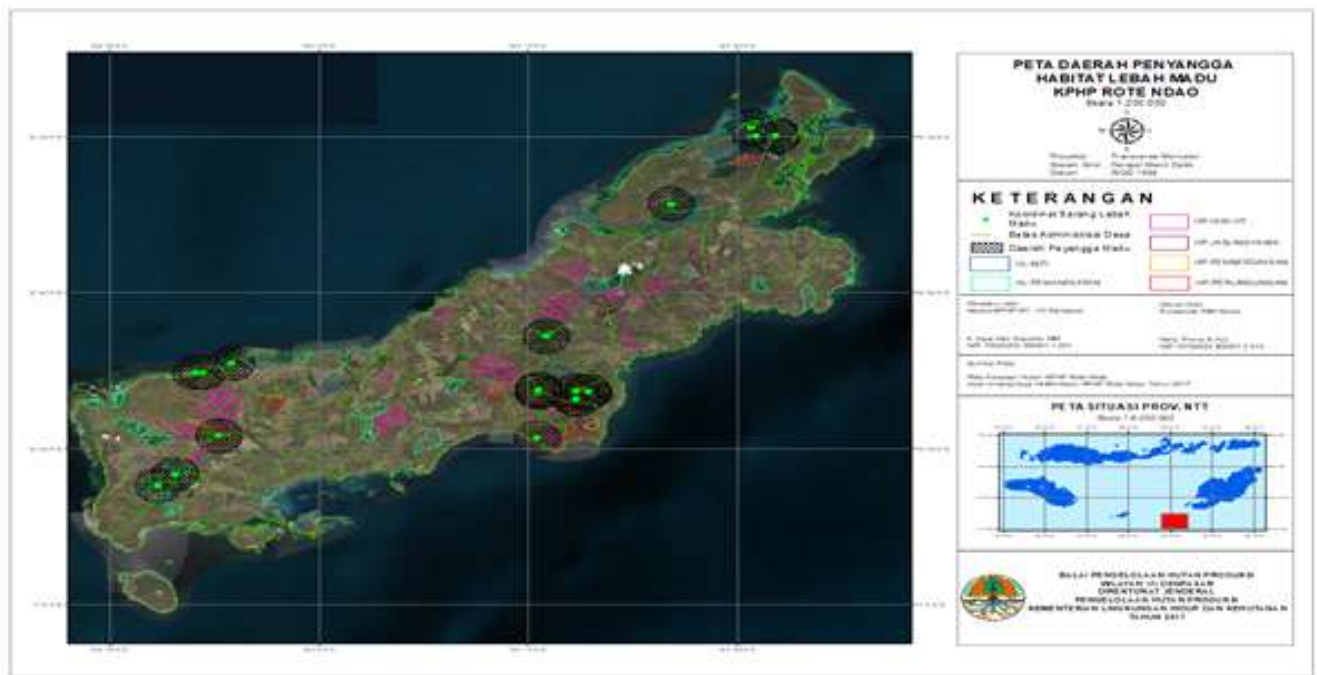
Pembuatan daerah penyangga terbentuk, sangat berguna untuk menentukan perlakuan-perlakuan yang mendukung kelestarian kehidupan lebah madu, antara lain:

1. Tidak menebang pohon sarang lebah madu;
2. Pengkayaan pohon yang menghasilkan nektar dan tepung sari untuk pakan lebah;
3. Menjaga keberadaan sumber air pada daerah penyangga;
4. Menghindari serangan hama lebah madu seperti semut, cecak, ngengat lilin, dan lain-lain;
5. Menjaga dari kebakaran hutan.

Berikut adalah peta daerah penyangga habitat lebah madu yang dibuat dengan menggunakan sistem informasi geografis:



Gambar 1. Peta Daerah Penyangga Habitat Lebah Madu KPHP Rote Ndao



Gambar 2. Peta Daerah Penyangga Habitat Lebah Madu KPHP Rote Ndao

Dari analisis SIG, diketahui bahwa terdapat 36 petak baik di hutan lindung maupun hutan produksi yang menjadi daerah penyangga habitat lebah. Petak-petak tersebut tersebar di RPH Landuleko,

RPH Rote Barat Laut, RPH Rote Barat, RPH Rote Tengah, dan RPH Rote Selatan. Berikut adalah sebaran petak yang menjadi daerah penyangga habitat lebah:

Tabel 3. Sebaran Petak Yang Menjadi Daerah Penyangga Habitat Lebah

NO	NAMA PETAK	NAMA RPH	DAERAH KELOMPOK HUTAN
1	HP-25	RPH Rote Barat Laut	Inggulangga/Ondat Kandang Kerbau
2	HP-27	RPH Rote Barat Laut	Inggulangga/Ondat Kandang Kerbau
3	HP-28	RPH Rote Barat Laut	Inggulangga/Ondat Kandang Kerbau
4	HP-29	RPH Rote Barat Laut	Inggulangga/Ondat Kandang Kerbau
5	HP-30	RPH Rote Barat Laut	Inggulangga/Ondat Kandang Kerbau
6	HP-31	RPH Rote Barat Laut	Inggulangga/Ondat Kandang Kerbau
7	HP-34	RPH Rote Barat Laut	Inggulangga/Ondat Kandang Kerbau
8	HP-40	RPH Rote Selatan	Lasilae
9	HP-41	RPH Rote Selatan	Lasilae
10	HP-44	RPH Rote Selatan	Lasilae
11	HP-45	RPH Rote Selatan	Lasilae
12	HP-46	RPH Rote Selatan	Lasilae
13	HP-47	RPH Rote Selatan	Lasilae
14	HP-79	RPH Rote Selatan	Nitasoko
15	HP-81	RPH Rote Selatan	Nonotodale Dodaek
16	HP-82	RPH Rote Selatan	Nonotodale Dodaek
17	HP-83	RPH Rote Selatan	Nonotodale Dodaek
18	HP-84	RPH Rote Selatan	Nonotodale Dodaek

19	HP-85	RPH Rote Selatan	Nonotodale Dodaek
20	HP-86	RPH Rote Selatan	Nonotodale Dodaek
21	HP-98	RPH Landuleko	Puatedi Piadae
22	HP-102	RPH Landuleko	Puatedi Piadae
23	HL-5	RPH Rote Barat	Inggulangga
24	HL-6	RPH Rote Barat	Inggulangga
25	HL-7	RPH Rote Barat	Inggulangga
26	HL-8	RPH Rote Barat	Inggulangga
27	HL-9	RPH Rote Barat	Inggulangga
28	HL-10	RPH Rote Barat	Inggulangga
29	HL-28	RPH Rote Barat Laut	Mangrove Oelua
30	HL-35	RPH Rote Barat Laut	Mangrove Tolama
31	HL-37	RPH Landuleko	Morisamalain
32	HL-39	RPH Landuleko	Motea Kaukardale
33	HL-40	RPH Landuleko	Motea Kaukardale
34	HL-41	RPH Landuleko	Motea Kaukardale
35	HL-42	RPH Landuleko	Motea Kaukardale
36	HL-47	RPH Rote Tengah	Tutuhu

Setelah daerah penyangga terbentuk, maka dapat dilakukan perlakuan-perlakuan untuk mendukung kelestarian kehidupan lebah madu, antara lain:

1. Tidak menebang pohon sarang lebah madu;
2. Pengkayaan pohon pakan lebah yang menghasilkan nektar dan tepung sari;
3. Menjaga keberadaan sumber air pada daerah peyangga;
4. Menghindari serangan hama lebah madu seperti semut, cecak, ngengat lilin, dan lain-lain;
5. Menjaga dari kebakaran hutan.

Kesimpulan

1. Terdapat 31 pohon dan tebing batu yang menjadi sarang lebah madu di KPHP Rote Ndao.
2. Daerah penyangga dibuat dengan jarak 2 km dari titik pusat koordinat sarang lebah madu.
3. Terdapat 36 petak baik di hutan lindung maupun hutan produksi di

KPHP Rote Ndao yang menjadi daerah penyangga habitat lebah.

4. Pembuatan daerah penyangga sangat berguna untuk menentukan perlakuan-perlakuan yang mendukung kelestarian kehidupan lebah madu.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Zet Mooy. Biologi Lebah dan Pengelolaan Habitat. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Usaha Pemanfaatan HHBK Madu di Tingkat Tapak. 2017
- Budi Zet Mooy. Modul Diklat Teknik Pemanenan dan Pengolahan Madu. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Usaha Pemanfaatan HHBK Madu di Tingkat Tapak. 2017
- Dedy Mesakh, dkk. Laporan Hasil Inventarisasi HHBK Madu UPT KPH Wilayah Kab. Rote Ndao. 2017
- Puspics. Pelatihan Aplikasi Teknologi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar. Fakultas Geografi UGM. 2017

Analisis Peraturan, Kajian untuk Penyempurnaan

Oleh Kiki Mirdiawan, S.H, M.H
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Menelisik lebih dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa menjelaskan bahwa tumbuhan dan satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui pengawetan jenis. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui upaya: (1) penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi, (2) pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya dan (3) pemeliharaan dan pengembangbiakan. Dalam hal penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang masuk dalam golongan yang dilindungi adalah dengan memperhatikan kriteria yaitu mempunyai populasi yang kecil, penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Dalam peraturan tersebut di atas dijelaskan bahwa pengawetan jenis dilakukan melalui kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya (in situ) dan untuk mendukung kegiatan pengelolaan dalam habitat dapat dilakukan kegiatan pengelolaan di luar habitat (ex situ) untuk menambah dan memulihkan populasi. Dengan dasar peraturan tersebut maka pemegang izin pemanfaatan dapat menebang semua jenis pohon di hutan

alam kecuali jenis Tengkawang.

Kemudian ketika kita mencermati Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan maka dalam pengenaan PSDH dan DR tidak dipisahkan berdasarkan spesies.

Pada Juni 2018, telah diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Peraturan ini diterbitkan untuk merubah jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi berdasarkan PP Nomor 7 tahun 1999, perubahan ini didasarkan pada otoritas keilmuan hasil penelitian. Kemudian terdapat perubahan kembali melalui peraturan P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018. Sehingga dari P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 jo P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 disebutkan bahwa : (a) larangan penebangan kayu sejumlah 25 spesies diantaranya jenis-jenis kayu yang tercantum dalam SK .163/Kpts-II/2003 (Merbau, Agathis, Kempas, Medang, Ulin, Resak, dst.); (b) jenis larangan tersebut menyebutkan detail jenis kayu per spesies; (c) larangan penebangan kayu tersebut

berlaku terhadap seluruh areal pemegang izin pemanfaatan.

Disisi lain kita melihat data tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 tercatat sudah di Laporan Hasil Produksi (LHP) kan untuk jenis :

- a. Medang 52.000,48 m³;
- b. Kempas 36.912,08 m³;
- c. Agathis 402 m³;
- d. Merbau 380.190,08 m³;
- e. Ulin 425,68 m³;

(Sumber : Direktorat IPHH, 2018)

Dan data Laporan Hasil Cruising (LHC) pada tahun 2018 yang terdapat pada SIPUHH terdiri dari :

- a. Medang 215.270,17 m³;
- b. Kempas 356.323,45 m³;
- c. Agathis 3.516,57 m³;
- d. Merbau 1.249.578,62 m³;
- e. Ulin 13.122,68 m³;

(Sumber : Direktorat IPHH, 2018)

Menjadi sebuah ironi ketika pemegang izin pemanfaatan yang beroperasi baik dan kondisi kayu melimpah di Sumatera sampai dengan Papua terkendala dengan terbitnya aturan P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 jo P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 karena hampir semua jenis yang dilarang tersebut tidak bisa ditebang. Hal tersebut juga berakibat operasional pemegang izin

pemanfaatan terganggu, penerimaan PSDH dan DR menurun, Banyak pemegang izin pemanfaatan berpotensi berurusan dengan penegak hukum, ekspor produk kayu menurun, kayu yang sudah di LHP kan busuk/rusak, IUPHHK-HA dan IUIPHHK banyak tutup dan terakhir potensi terjadinya peningkatan pengangguran.

Dengan berbagai pertimbangan, masih terdapat produk kayu yang telah melaksanakan penatausahaan hasil hutan/telah melaksanakan pembayaran PNPB dan kondisi kayu yang melimpah di lapangan, maka seyogyanya perlu peninjauan kembali terhadap penetapan jenis tumbuhan yang dilindungi dalam P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 mengingat jenis tumbuhan tersebut masih banyak tumbuh di kawasan hutan produksi, selain itu pola pengelolaan hutan produksi mengedepankan pola pengelolaan hutan yang lestari dimana dalam hal ini pemegang izin pemanfaatan hanya menebang tumbuhan dengan diameter di atas 50 cm karena penebangan di bawah 50 cm akan menyebabkan kerugian. Penebangan dengan diameter di atas 50 cm masih memberikan ruang hidup bagi anakan tumbuhan dan rotasi daur selama 35 tahun akan memungkinkan tercapainya pengelolaan hutan produksi yang lestari (Sumber : Direktorat UHP, 2018).



Gambar 1. Direktur PPHH menerima Penghargaan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018, pada pameran The International Public Service Forum (IPS Forum) 2018 – Jakarta Convention Center (7/11/2018).

Cara SILK Menjawab Tantangan Global Perdagangan Kayu Legal, Hingga Meraih Penghargaan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018

Oleh: Rizky Maulana Pujas

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

SILK “Sistem Informasi Legalitas Kayu” yang digawangi oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (Dit.PPHH), Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen.PHPL). Sistem Informasi ini diluncurkan pada 1 Agustus 2012 sebagai bagian dari SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu), yang berperan *licensing information unit*, sekaligus sebagai pusat informasi verifikasi legalitas kayu.

Dalam menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk ekspor, SILK terhubung dengan INATRADE (*Indonesian Trading*) di Kementerian Perdagangan, INSW (*Indonesia National Single Window*) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan, dan pihak berwenang atau *Competent Authority* di negara tujuan ekspor.

Kamu Harus Tau.. begitu transparannya SILK, kita dapat mengetahui berapa ekspor produk industri kehutanan Indonesia saat ini, secara *real time*! Informasi mulai dari mana ekspor dilakukan, kemana tujuan ekspornya, berapa berat produk dan berapa nilainya dapat kita pantau secara online di 'silk.dephut.go.id.' Inovasi SILK adalah platform online pertama di dunia, untuk penerbitan dokumen penjaminan legalitas kayu.

SILK adalah wajah SVLK. Semua informasi terkait SVLK dapat dilihat di

SILK, mulai dari informasi mengenai daftar Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL), Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), penerbit dokumen V-Legal, pemegang sertifikat, eksportir, importir, pemantau independen dll. SILK juga menjadi jembatan antara pemerintah dan publik dalam merumuskan kebijakan SVLK karena draft peraturan diupload di SILK untuk mendapat masukan publik. SILK pun menjadi tempat untuk update informasi proses FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa. Banyaknya pihak yang terkoneksi dalam SILK, inovasi yang tiada henti, serta pelayanan 24 jam, tak heran jika Tim Pakar

dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian PAN RB, Peneliti Utama Badan Litbang Inovasi KLHK dan Pejabat Sekretariat Jenderal KLHK memilih SILK unggul dalam 7 (tujuh) kategori inovasi, yaitu proses, metode, produk, konseptual, teknologi, hubungan dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga SILK menyabet gelar Juara Pertama dalam Kompetisi *Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Sinolinghut) 2017* di Kementerian LHK dalam rangkaian acara Hari Bakti Rimbawan ke-35, Auditorium Gd. Manggala Wanabakti, Jum'at 16 Maret 2018.



Gambar 2. Penyerahan Juara Pertama dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KLHK (Sinolinghut) 2017, langsung oleh menteri LHK kepada Direktur PPHH – Auditorium Manggala Wanabakti KLHK (16/3/2018).



Gambar 3. Penyerahan penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik oleh Menteri PANRB kepada Sekretaris Jenderal KLHK – Surabaya (19/9/2018).

“Juara 3 besar selanjutnya akan diikutsertakan di lomba Sinovik 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB dan diharapkan bisa masuk ke top 99”, harapan Menteri LHK dalam rangkaian acara Hari Bakti Rimbawan. Pada hari rabu malam, 19 September 2018, SILK pun berhasil menembus jajaran *TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018*. Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menerima penghargaan tersebut mewakili KLHK, yang diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin di Surabaya. Inovasi SILK juga telah masuk seleksi Tim Panelis Independen sejak Agustus 2018, sebagai tahap lebih lanjut menuju penetapan 'Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018'. Mendukung pencapaian Nawa Cita ke-6 'peningkatan

daya saing produk Indonesia di pasar internasional' dengan implementasi SILK, mendorong peningkatan perdagangan kayu legal, mengubah citra Indonesia menjadi negara terdepan dalam upaya penanggulangan illegal logging. Hingga akhirnya SILK berhasil menembus *TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018* merupakan inovasi yang dikategorikan *outstanding* (terpuji), hasil seleksi dari TOP 99, terpilih dari 2.824 inovasi yang ikut berkompetisi,. Rabu, (17/11/2018). Mewakili Indonesia, SILK juga menjadi satu-satunya inovasi pelayanan publik yang dikirim Kementerian PANRB ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam kompetisi Observatory of Public Sector Innovation tingkat dunia.



Gambar 4. Stand SILK mewakili KLHK pada pameran The International Public Service Forum (IPS Forum) 2018 – Jakarta Convention Center (7/11/2018).



Gambar 5. Piala Penghargaan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik oleh Wapres RI (Jusuf Kalla) kepada Menteri LHK (Siti Nurbaya), pada pembukaan The International Public Service Forum (IPS Forum) 2018 – Jakarta Convention Center (7/11).

Optimalisasi IUIPHHK Berkapasitas Sampai Dengan 6000 M³ Per Tahun Dalam Peningkatan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku Dan Peningkatan Kualitas Produk

Oleh : 1). Lia Yunita, S.Hut 2). Muhammad Saleh, S.Hut 3). Busran, S.Hut
BPHP Wilayah IX Banjarbaru

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019 menyebutkan salah satu agendanya yaitu: Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional”; dengan Sub Agenda: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional”; dengan sasaran: “Peningkatan Produksi Kayu”; dan arah kebijakan: “Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sumber Daya Hutan serta Mengembangkan Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu ditujukan untuk Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Kehutanan”. Dalam mengembangkan industri pengolahan hasil hutan kayu untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan berkaitan erat dengan efisiensi penggunaan bahan baku dan peningkatan kualitas produk, sehingga layak untuk ekspor.

Efisiensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya). Efisiensi Penggunaan Bahan Baku IUIPHHK dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.9/Menhut-II/2012 diartikan sebagai perbandingan selisih rendemen kayu olahan riil lebih besar dari standar rendemen kayu olahan. Rendemen kayu olahan riil adalah indeks

perbandingan capaian produksi kayu olahan (output) terhadap penggunaan bahan baku (input) yang dinyatakan dalam persen.

Titik kritis dalam pengembangan industri kayu antara lain: ketersediaan bahan baku, karakteristik bahan baku yang kurang sesuai, proses pengolahan, SDM dan pemasaran. Sebagai contoh, di wilayah Kalimantan Selatan, IUIPHHK dengan kapasitas produksi di atas 2000 m³ per tahun sampai dengan 6000 m³ per tahun yang terdaftar di RPBB online sebanyak 123 unit, tetapi yang aktif pada tahun 2018 sebanyak 77 unit. Sebagian besar IUIPHHK yang tidak aktif tersebut mengalami kendala akan ketersediaan bahan baku kayu.

Hampir semua IUIPHHK berkapasitas produksi sampai dengan 6000 m³ per tahun memproduksi kayu gergajian. Pada proses penggergajian, sebagian besar industri masih banyak yang menggunakan perkiraan dalam menggergaji maupun memotong kayu sehingga rendemen yang dihasilkan lebih kecil dari semestinya. Alat yang sudah tua dan miskin perawatan akan mengakibatkan garis potong yang tidak terlalu lurus sehingga akan mengurangi kualitas hasil akhir. Pada proses produksi kayu gergajian, terjadi proses pemotongan

dan pengrapian dari bentuk asalnya yaitu kayu bulat. Pada proses ini rendemen yang dihasilkan bervariasi antara 40-70% (laporan IUIPHHK Kalsel Tahun 2017-2018). Persentase kehilangan paling banyak adalah pada proses pemotongan itu sendiri yang menghasilkan serbuk. Pada kajian akademik ada istilah jarak pergeseran kayu yang dihitung dari penjumlahan lebar giwaran ditambah dengan getaran. Persentase kehilangan volume dalam kasus jarak pergeseran ini kurang lebih 15-20%. Semakin bagus alat dan perawatan, maka volume serbuk akibat jarak pergeseran akan semakin kecil. Persentase kehilangan volume akan semakin tinggi jika semakin banyak terjadi proses pembelahan. Selain itu, nilai jual kayu gergajian ukuran besar lebih mahal dibandingkan kayu gergajian berukuran kecil pada volume total yang sama.



Gambar 1. Proses Penggergajian Kayu

Sebagian besar industri kayu gergajian juga menggunakan sistem pengeringan alami. Sistem pengeringan alami membutuhkan waktu kering yang lama dan tingkat distribusi kadar air pada papan yang relatif tinggi. Cacat retak,

kegagalan sambungan dan kualitas finishing yang kurang sempurna juga merupakan dampak dari kegagalan proses pengeringan (Listyanto 2016). Pengetahuan industri tentang cara pengeringan kayu yang baik relatif kurang. Adanya tingkat biaya yang lebih tinggi untuk menyediakan alat pengering yang baik juga menjadi kendala. Padahal untuk mendapatkan kualitas baik, kadar air akhir seperti yang diinginkan dan dengan distribusi yang merata serta cacat yang minimal merupakan sebuah prasyarat, terutama untuk ekspor. Penerapan penyusunan jadwal pengeringan yang benar dan beberapa perlakuan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengeringan kayu (Listyanto, 2016).



Gambar 2. Proses Pengeringan Kayu secara alami

Proses pengawetan juga menjadi kelemahan bagi industri kayu. Hampir semua tidak melakukan kegiatan pengawetan. Kualitas barang tanpa diawetkan tidak tampak pada saat jual beli, tetapi dampak jangka panjang akan mengakibatkan tingkat kepercayaan terhadap produsen berkurang. Untuk ekspor, produk yang pada masa garansi

mengalami kendala serangan organisme perusak kayu, akan mengakibatkan kerugian yang luar biasa. Produsen harus menanggung biaya pengembalian barang yang terserang dan mengganti barang tersebut dengan yang baru atau nilai barang akan turun karena tidak sesuai dengan standart yang diminta konsumen.

Strategi untuk meningkatkan nilai tambah yang optimal adalah dengan menerapkan pola efisiensi pada setiap tingkatan proses. Pada proses penggergajian diperlukan pemilihan kayu bulat yang baik, penyiapan alat gergajian yang tepat dan terawat, kemampuan tenaga kerja yang andal serta manajemen proses yang terjaga. Jika hal tersebut terpenuhi, UIIPHHK berkapasitas produksi sampai dengan 6000 m³ per tahun akan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakunya serta meningkatkan kualitas produk hingga layak untuk pasar ekspor dengan memperhatikan sertifikat legalitas kayunya.

DAFTAR PUSTAKA

Listyanto, T. (2016). Teknologi Pengeringan Kayu dan Aplikasinya di Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu

<https://www.kbbi.web.id>

Diakses tanggal 7 November 2018.

Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari “Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas Dan Kerja Tuntas”

Oleh: Ratu Ferra Restiana, SE
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, diperlukan Aparatus Sipil Negara (ASN) yang profesional dalam memberikan pelayanan publik. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, ASN dituntut harus tetap menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsi. Guna menjag sikap profesionalitas dan peningkatan prestasi kerja ASN lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) maka dilakukan pembinaan ASN. Pembinaan ASN lingkup Ditjen PHPL dilaksanakan di Ruang Rimbawan I Gedung Manggala Wanabakti pada hari kamis tanggal 15 November 2018 yang diikuti oleh seluruh ASN Ditjen PHPL, serta di hadiri undangan Darma Wanita Ditjen PHPL.

Dengan diadakannya pembinaan ASN lingkup Ditjen PHPL, diharapkan mampu meningkatkan usaha dan kemampuan ASN guna pertumbuhan kualitas ASN yang berkesinambungan di dalam organisasi Ditjen PHPL. Pembinaan pada umumnya memiliki tujuan dan manfaat yaitu membentuk karakter dan berkepribadian. Dalam hal ini, pembinaan ASN lingkup Ditjen PHPL juga mempunyai

tujuan yang sama yaitu membentuk karakter dan kepribadian ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pembukaan ASN lingkup Ditjen PHPL diawali dengan sambutan Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL Bapak Ir Misran, MM. Berikutnya dilanjutkan dengan arahan dari Direktur Jenderal PHPL Bapak Direktur Jenderal PHPL Ir Hilman Nugroho, yang memberikan arahan agar ASN lingkup Ditjen PHPL dapat bekerja dengan prinsip:

1. Berorientasi pada kepuasan pelanggan.
2. Tempatkan pelanggan sebagai raja.
3. Membangun komunikasi yang efektif, responsive dengan pelanggan.
4. Pelayanan yang berkualitas dan melebihi harapan.
5. Respek terhadap individu harus diutamakan dalam memberikan pelayanan dan harus respek terhadap individu.

Lebih lanjut disampaikan oleh Direktur Jenderal PHPL, bahwa untuk dapat melaksanakan kelima prinsip tersebut, ASN harus mempunyai falsafah hidup, yaitu,

1. Jujur.
2. Cepat beradaptasi.
3. Tenang.
4. Selalu ingin hal baru.
5. Peka terhadap lingkungan.
6. Semangat.
7. Sehat.
8. Menjadi tumpuan masa depan.

Setelah arahan dari Direktur Jenderal PHPL, pembinaan dilanjutkan dengan mengundang narasumber Ustadz Yasir Lupito. Sesuai dengan tujuan dari pembinaan tersebut, Ustadz Yasir Lupito menyampaikan beberapa hal terkait profesionalitas dan proporsionalitas ASN:

1. Kerja Cerdas. Seorang ASN tidak hanya dituntut memiliki kecerdasan secara intelektual, tetapi pandai mengelola emosi dan memiliki kecerdasan spiritual dengan bertaqwa kepada Allah SWT serta

melakukan banyak amal ibadah. Seorang ASN harus bisa memadukan kemampuan pikiran dengan kemampuan hati. Dengan demikian, seorang ASN tidak akan pernah menyalahkan apapun dengan apa yang diberikan kepadanya dan pada yang diterimanya.

2. Kerja Ikhlas. Seorang ASN yang bekerja dengan cerdas pasti akan ikhlas, karena mengerti bahwa yang dikerjakan berupa kebaikan.

3. Kerja Tuntas. ASN yang kerja cerdas dan kerja ikhlas maka ia dalam mengerjakan tugasnya akan tuntas dengan memperoleh hasil yang baik. Sedangkan untuk bisa kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas adalah harus selalu berterima kasih, terus terang dan sabar.

Workshop Pengembangan Jabatan Fungsional PEH Lingkup Ditjen PHPL

Mau dibawa kemana PEH Ditjen PHPL?

Oleh : Anindya Marni Andana

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 70 (ayat 1-4) mengamanatkan bahwa setiap pegawai (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran. Dan untuk mengembangkan kompetensi ASN setiap instansi wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Ketiga tentang Jabatan Fungsional menjelaskan bahwa Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) sebagai jabatan fungsional tertentu binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai ujung tombak dalam menjaga, melindungi dan melestarikan ekosistem hutan pejabat fungsional PEH harus profesional, mempunyai kompetensi dan integritas tinggi.

Salah satu upaya peningkatan kompetensi pejabat fungsional PEH lingkup Ditjen PHPL tahun 2018 adalah dengan kegiatan Workshop Pengembangan Jabatan Fungsional PEH yang diadakan selama 3 (tiga) hari tanggal 25-27 Oktober 2018 di Hotel Grage Jogjakarta. Narasumber yang dihadirkan dalam workshop ini antara lain dari Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen KLHK dan Pusat Perencanaan dan Pengembangan (Pusrenbang) SDM KLHK.



Gambar 1. Pembukaan Workshop

Materi workshop antara lain membahas :

1. Permasalahan administrasi jabatan fungsional
2. Kompetensi dan profesionalisme Pejabat Fungsional PEH
3. Perbaikan hasil uji petik butir butir revisi kegiatan PEH
4. Identifikasi Pengembangan Jabatan Fungsional PEH

5. Manajemen Jabatan Fungsional Binaan Kementerian LHK

Berdasarkan Permenlhk nomor P.67/Menlhk-Setjen/2016 ada 279 unit kompetensi teknis PEH yang mencakup 4 bidang yaitu : 1. Bidang perencanaan hutan, 2. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Pengelolaan DAS, 3. Bidang konservasi Sumber Daya Hutan dan 4. Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan.

Dari hasil survey online identifikasi pengembangan jabatan fungsional PEH yang dilakukan oleh Pusrenbang khususnya bidang pemanfaatan dan usaha kawasan, iuran dan peredaran hasil hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan diperoleh hasil yang masih jauh dari harapan.

Berikut contoh hasil dan rekomendasi uji petik untuk UPT :



Hasil dan Rekomendasi untuk UPT

Nilai Kompetensi Teknis PEH Tingkat Keahlian di BHPH Wilayah XIII Makassar

No	Kode	Kompetensi	Nilai	Responden	Rekomendasi Pengembangan
1	KHT.PEH.279.01	Melakukan evaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan	20,00	1	Diklat
2	KHT.PEH.272.01	Menyusun bahan informasi teknis	20,00	1	Diklat
3	KHT.PEH.105.01	Memonitoring lapangan dalam ...	33,33	1	Bimtek
4	KHT.PEH.065.01	Melakukan pemantauan lain industri	33,33	1	Bimtek
5	KHT.PEH.073.01	Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian hasil hutan kayu	33,33	1	Bimtek
6	KHT.PEH.061.01	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemantauan jasa lingkungan dan	40,00	1	Magang
7	KHT.PEH.069.01	Melakukan pengujian dalam rangka ...	40,00	1	...
8	KHT.PEH.277.01	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan	50,00	6	...
9	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora	53,33	3	Bimtek
10	KHT.PEH.100.01	Melakukan cross check dokumen surat	60,00	1	Studi Banding
11	KHT.PEH.064.01	Melakukan pengujian usulan lain industri	66,67	1	Seminar
12	KHT.PEH.076.01	Menganalisis data pengendalian penilaian hasil hutan non kayu	66,67	1	...
13	KHT.PEH.079.01	Melakukan uji petik penilaian pemenuhan/pemantauan lahan hutan	66,67	1	...
14	KHT.PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH	72,73	7	Sosialisasi
15	KHT.PEH.003.01	Melakukan penyusunan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan	75,00	2	Seminar
16	KHT.PEH.144.01	Memberikan saran tindak lanjut	76,92	3	...
17	KHT.PEH.099.01	Memonitoring lapangan dalam rangka	76,92	3	...
18	KHT.PEH.096.01	Melakukan penilaian Pengelolaan Hutan	80,00	1	...
19	KHT.PEH.072.01	Menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu	80,00	1	...
20	KHT.PEH.002.01	Melakukan identifikasi potensi sumberdaya hutan	100,00	3	...
21	KHT.PEH.101.01	Memberikan saran tindak lanjut penilaian dokumen iuran kehutanan	100,00	1	...

279

Artinya, 9 orang SDM PEH di UPT tersebut sudah melaksanakan 21 unit kompetensi teknis dari total 279 unit kompetensi teknis.

CONTOH REKOMENDASI PENGEMBANGAN

Salah satu kompetensi yang perlu ditingkatkan adalah "Melakukan pemantauan lain industri" dengan metode pengembangan yaitu **DIKLAT**.

Hasil dan Rekomendasi untuk UPT

Nilai Kompetensi PEH Tingkat Keahlian di BHPH Wilayah I Banda Aceh

UPT	Res	No	Kode	Kompetensi	Nilai	Responden	Rekomendasi Pengembangan
BHPH Wilayah I Banda Aceh	7	1	KHT.PEH.105.01	Memeriksa lapangan dalam	40,00	1	Bimtek
BHPH Wilayah IV Jambi	5	2	KHT.PEH.277.01	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan	51,43	7	Bimtek
BHPH Wilayah IX Banjarbaru	5	3	KHT.PEH.054.01	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemantauan hasil hutan	60,00	1	Bimtek/Magang
BHPH Wilayah VI Bandar Lampung	1	4	KHT.PEH.001.01	Menyusun rencana kerja PEH	71,43	7	...
BHPH Wilayah VII Dangdang	3	5	KHT.PEH.144.01	Memberikan saran tindak lanjut	73,33	6	...
BHPH Wilayah VIII Pontianak	6	6	KHT.PEH.072.01	Menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu	76,00	5	...
BHPH Wilayah XIII Makassar	9	7	KHT.PEH.008.01	Melakukan inventarisasi flora	80,00	1	...
BHPH Wilayah XIV Ambon	3	8	KHT.PEH.002.01	Melakukan identifikasi potensi sumberdaya hutan	80,00	1	...
BHPH Wilayah XV Jayapura	1	9	KHT.PEH.099.01	Memeriksa lapangan dalam rangka ...	82,86	7	Kompeten
		10	KHT.PEH.100.01	Melakukan cross check dokumen iuran	100,0	1	...
		11	KHT.PEH.056.01	Menelaah peta dan data terkait dengan pemibutan peta areal kerja	100,0	1	...

279

Artinya, 7 orang SDM PEH di BHPH WII I Banda Aceh baru melaksanakan 11 unit kompetensi teknis dari total 279 unit kompetensi teknis.

CONTOH REKOMENDASI PENGEMBANGAN

Salah satu kompetensi yang perlu ditingkatkan adalah "Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan" dengan metode pengembangan yaitu **BIMTEK**.

Sumber : Pusrenbang 2018

Selain membahas identifikasi kebutuhan kompetensi jabatan fungsional PEH dalam workshop ini juga dibahas uji petik pelaksanaan perubahan butir butir kegiatan jabatan fungsional PEH.

Kegiatan workshop ini diharapkan mampu menelurkan gagasan dan strategi dalam mengembangkan kompetensi pejabat fungsional khususnya PEH PHPL.



SELAMAT

Selamat
Tahun Baru
2019



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUATANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 5
Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp. 021-5730236 / Fax. 021-5733336

 Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

 @DitjenPHPL

 Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

 @DitjenPHPL